



Transforming
Education



Save the Children



PUSAT STUDI PENDIDIKAN
DAN KEBIJAKAN



Analisis Situasi Keterampilan Dasar, GEDSI, Pendidikan Perubahan Iklim dan Perlindungan Anak di Sektor Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

Dokumen disiapkan oleh PSPK untuk Save the Children Indonesia. Dibiayai oleh Global Partnership for Education (GPE) Program Development Grant (PDG).

2024

Diterbitkan oleh Save the Children Indonesia
@2024 PSPK dan Save the Children Indonesia
Foto sampul: Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK)
Diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh: Tosman Efendi

Dokumen ini, serta data apa pun yang disertakan di sini, tanpa mengurangi status atau kedaulatan atas wilayah mana pun, batas perbatasan dan batas internasional dan nama wilayah, kota, atau wilayah mana pun.

Silakan kutip laporan ini sebagai:

PSPK dan Save the Children (2024). Analisis Situasi Keterampilan Dasar, GEDSI, Pendidikan Perubahan Iklim dan Perlindungan Anak di Sektor Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Jakarta: Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) dan Save the Children Indonesia.

Apresiasi

Tim Pengarah

Save the Children: Caroline Keenan, Kimberly Parekh, Imelda Usnadibrata, Adhimas Wijaya, Anggi Maulana Nasution | **PSPK:** Nisa Felicia Faridz, Ph.D, Dr. Stien J. Matakupan

Tim Peneliti

PSPK: Sari Oktafiana, Yudo Hato Balibo Timtim, Muhammad Ciro Danuza, Allamuddin Al Faruq, Muhamad Nur Chozin, Dinda Alshauma Dwi Harman, Adesti Komalasari, Ditha Cahya Kristiena

Tim Pendukung

Save the Children: David Wala, Buana Monica Sitanggang, Didiek Eko Yuana, Silverius Tasman Muda, Andri Yoga Utami, Agustinus Mau Tukan, Karla Klau, Ahmad Firdaus, Rendiansyah Putra Dinata, Yohannes Suban Ebang, Chenia Ilma Kirana, Madina Muhammad | **PSPK:** Khoirunnisa Rasadi, Mutiara Lubis, Fanny Shafiyah Qolbi, Qonita Beldatis Syafiqo, Ary Purnama Dewi

Penyunting, Foto Sampul & Tata Letak

PSPK: Wisnu Ari Susilo

Terima kasih khusus kepada:

❖ *Co-Chairs:*

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)—sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
- Kementerian Agama (Kemenag)

❖ Seluruh anggota **Mitra Pendidikan Indonesia (MPI)**

❖ **Pemerintah Daerah:**

- Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan
- Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat
- Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara
- Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai

❖ **Sekolah (TK, RA, SD, MI) dan komunitas** (yayasan, asosiasi guru dan kepala sekolah, organisasi non-pemerintah, serta lembaga lainnya) di daerah di atas.

atas penerimaan, arahan, partisipasi dan dukungannya dengan antusias.

Singkatan

AKMI	Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MI	Madrasah Ibtidaiyah
Bapperida	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	MPI	Mitra Pendidikan Indonesia atau LEG
BGP	Balai Guru Penggerak	P5	Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
BPMP	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan	PAUD	Pendidikan anak usia dini
Calistung	Membaca, Menulis Berhitung	PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PINTAR	Pusat Informasi Pelatihan dan Pembelajaran
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> [Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial]	PMM	Platform Merdeka Mengajar
GPE	Global Partnership for Education	PSPK	Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan
IGI	Ikatan guru Indonesia	RPJMD	Rencana pembangunan jangka Menengah daerah
IPM	Indeks pembangunan manusia	SD	Sekolah dasar
KKG	Kelompok Kerja Guru	SIBI	Sistem Informasi Perbukuan Indonesia
KKKS	Kelompok Kerja Kepala Sekolah	TK	Taman kanak-kanak
KSP	Kurikulum satuan pendidikan	TPPK	Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
LEG	<i>Local Education Group</i> atau MPI		

Ringkasan Eksekutif

Peningkatan literasi, numerasi, pendidikan karakter, inklusi sosial, dan pendidikan perubahan iklim di sekolah sangat penting untuk membina individu yang berwawasan luas, berpengetahuan, dan bertanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan Merdeka Belajar, yang berupaya untuk mengubah pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik di mana semua pemangku kepentingan—guru, siswa, orang tua, dan masyarakat—dapat berkontribusi secara aktif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan holistik siswa.

Untuk mencapai tujuan ini, Global Partnership for Education (GPE) atau Kemitraan Global untuk Pendidikan bermitra dengan Save the Children Australia dan Save the Children Indonesia untuk memberikan *Multiplier Grant* untuk Indonesia. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa melalui praktik, sistem, dan kebijakan pendidikan, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Untuk pengembangan program, agen hibah bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk menganalisis situasi Keterampilan Dasar (Numerasi, Literasi, dan Pembentukan Karakter), GEDSI dan Perubahan Iklim, serta Perlindungan Anak di sektor Pendidikan Anak Usia Dini & Dasar di 4 provinsi, 8 kabupaten di Indonesia.

Studi kualitatif dilakukan di delapan daerah di empat provinsi dari Maret hingga Juli 2024, menyajikan berbagai temuan dari praktik baik dan juga tantangan untuk meningkatkan transformasi pembelajaran agar selaras dengan tujuan GPE, memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Selain itu, temuan tersebut mendukung visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa pada keterampilan dasar (literasi, numerasi, dan karakter). Studi ini melibatkan berbagai aktor kunci dalam pendidikan di daerah. Temuan tersebut menyajikan analisis lanskap pendidikan, dengan fokus pada komponen-komponen utama seperti kurikulum dan penilaian, praktik mengajar, kepemimpinan pendidikan, dan perlindungan anak.

Studi ini juga mengkaji isu-isu lintas sektoral seperti kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), dan perubahan iklim. Analisis tersebut mengungkapkan praktik-praktik baik di daerah, komitmen untuk meningkatkan pendidikan yang terbukti dalam kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, temuan dari daerah mencakup tantangan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan capaian pendidikan di daerah yang diteliti secara umum di bawah rata-rata provinsi, yang menunjukkan perlunya intervensi yang tepat sasaran untuk meningkatkan hasil pendidikan. Sementara itu, capaian keterampilan dasar berdasarkan Asesmen Nasional (AN)—Rapor Pendidikan dan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) masih rendah di delapan daerah dalam hal literasi, numerasi, dan iklim inklusivitas perlu ditingkatkan di tingkat dasar. Selain itu, data Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa delapan kabupaten perlu lebih memperhatikan proporsi guru PAUD berkualifikasi sarjana dan angka partisipasi kasar (APK) untuk anak usia 5–6 tahun.

Analisis tematik menyoroti praktik terbaik dalam kurikulum dan asesmen, yang menunjukkan potensi reformasi Merdeka Belajar untuk mengubah hasil pendidikan secara inklusif. Ada sekolah yang telah berupaya menerapkan kurikulum inklusif dan terlibat dalam komunitas pembelajaran profesional. Beberapa kabupaten berupaya menerapkan transisi yang menyenangkan dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar. Juga, GEDSI diterima dan

dipromosikan di beberapa kabupaten. Ini sejalan dengan data dari Rapor Pendidikan. Selain itu, analisis tersebut mengungkap kurangnya pemahaman tentang Kurikulum Merdeka di antara guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan. Materi pembelajaran termasuk buku bacaan anak-anak tidak memadai. Dalam hal pendidikan perubahan iklim dan GEDSI. Studi ini juga mengidentifikasi integrasi pendidikan perubahan iklim dan GEDSI yang tidak memadai ke dalam kurikulum, dan sistem pengembangan profesional yang tidak optimal untuk guru dan kepala sekolah.

Praktik terbaik dalam praktik pengajaran mengindikasikan bahwa beberapa guru menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dengan mengelola kelas berdasarkan karakteristik dan kebutuhan anak-anak, menerapkan disiplin positif, terlibat dalam komunitas pembelajaran profesional, secara mandiri menemukan materi pengajaran di internet dan mendiskusikan metode pengajaran untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Hasil dari Rapor Pendidikan juga menunjukkan bahwa suasana kelas menjadi lebih kondusif dengan guru yang memberikan dukungan afektif dan aktivasi kognitif. Tantangan dalam praktik mengajar menggarisbawahi kurangnya pengembangan profesional untuk guru, terbatasnya pemanfaatan sumber belajar yang beragam, kesulitan dalam memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka, keterampilan manajemen kelas yang tidak memadai, dan hambatan dalam mengakses dan memanfaatkan PMM atau PINTAR. Selain itu, tantangan seperti lokasi geografis, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya personel terlatih, dan keterbatasan anggaran menghambat pemahaman dan implementasi program GEDSI di daerah.

Dalam aspek kepemimpinan pendidikan, penelitian ini menemukan potensi-potensi baik seperti keterlibatan dalam pengembangan kurikulum, mempertimbangkan unsur-unsur pendidikan inklusif dan perubahan iklim, berfokus pada pengembangan profesional guru, memastikan keselamatan fisik dan psikologis bagi siswa, dan menjamin akses yang sama terhadap kesempatan belajar bagi semua siswa. Beberapa pemimpin sekolah telah mulai menerapkan pelatihan anti-perundungan bagi staf pengajar, kebijakan untuk mempromosikan partisipasi siswa perempuan. Namun, ada tantangan seperti kurangnya kolaborasi di antara kepala sekolah, pemahaman yang tidak memadai tentang pendidikan inklusif, kesetaraan gender, dan perubahan iklim, serta perlunya kebijakan khusus untuk memandu reformasi pendidikan dan alokasi sumber daya. Tidak adanya pelatihan kepemimpinan instruksional, kolaborasi yang tidak memadai, dan kesulitan dalam memanfaatkan data laporan pendidikan untuk pengambilan keputusan berbasis data juga diidentifikasi dalam penelitian ini.

Dalam konteks perlindungan anak, kajian ini mengidentifikasi beberapa inisiatif, antara lain: penetapan regulasi yang ditujukan untuk menanggulangi kekerasan anak, pembentukan kelompok kerja untuk mengawasi dan menanggulangi isu perlindungan anak, pelaksanaan kampanye penyadaran dan program pelatihan bagi guru dan pengasuh, serta penyediaan layanan dukungan bagi anak yang mengalami kekerasan. Namun, analisis ini mengungkap kurangnya pemahaman mengenai Kebijakan Perlindungan Anak (TPPK) dan Prosedur Operasional Standar (SOP) penanganan kasus perlindungan anak di sekolah, stigma masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak, penguatan jaringan pemangku kepentingan terkait perlindungan anak yang belum merata, serta terbatasnya ketersediaan sarana pendukung seperti transportasi antarpulau. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi daerah tentang pendidikan dan perlindungan anak telah ada, masih diperlukan pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif untuk memastikan implementasi yang efektif. Lebih jauh, kajian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan aktor kunci daerah, perbaikan kurikulum dan sistem pendukung penilaian, praktik, serta pembinaan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berwawasan iklim.

Daftar Isi

Apresiasi.....	ii
Singkatan	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
1. Pendahuluan.....	1
2. Temuan.....	5
2.1. Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat.....	7
2.2. Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai	15
2.3. Ketapang dan Kayong Utara	23
2.4. Nias Utara dan Nias Selatan.....	32
3. Kesimpulan & Rekomendasi	44
3.1. Kesimpulan.....	44
3.2. Rekomendasi	46
Referensi	48
Lampiran	49

1. Pendahuluan

Global Partnership for Education (GPE) atau Kemitraan Global untuk Pendidikan adalah kemitraan kolaboratif dan platform keuangan yang didedikasikan untuk memperkuat sistem pendidikan di negara-negara berkembang. Dalam pekerjaan mereka di negara-negara tertentu, GPE secara konsisten menggunakan pendekatan kemitraan multi-pemangku kepentingan yang unik. Mereka menyatukan semua anggota Local Education Group (LEG)—atau dalam konteks Indonesia disebut dengan Mitra Pendidikan Indonesia (MPI)—dan semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mengubah sistem pendidikan, dengan fokus pada area dan individu yang menghadapi kebutuhan terbesar. Salah satu pendekatan unik GPE disebut *Multiplier Grant* atau Hibah Pengganda. Hibah Pengganda GPE adalah instrumen keuangan inovatif yang memberikan insentif dan sumber daya keuangan untuk mendukung investasi yang lebih baik dalam pendidikan. Indonesia telah menjadi mitra GPE sejak 2022. Pada tahun 2023 lalu, GPE menunjuk Save the Children Australia bersama dengan Save the Children Indonesia sebagai Agen Hibah untuk *Multiplier Grant* mulai dari Juli 2024 hingga Juli 2028.

Tujuan utama Hibah Pengganda GPE di Indonesia adalah untuk memperluas program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) fase 3. Program INOVASI fase 3 merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia (GoA) dan Pemerintah Indonesia (GoI) untuk mengidentifikasi dan mendukung perubahan guna meningkatkan hasil belajar siswa melalui praktik, sistem, dan kebijakan pendidikan. Program ini juga harus selaras dengan peta jalan menuju transformasi pendidikan, yang dikembangkan oleh anggota MPI dan ditulis dalam dokumen *Partnership Compact*.

Dalam menyusun program tersebut, Save the Children Indonesia, sebagai agen hibah, bermitra dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), untuk menganalisis situasi yang terkait dengan Keterampilan Dasar (Numerasi, Literasi, dan Pembentukan Karakter), kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), perubahan iklim, dan perlindungan anak di sektor pendidikan anak usia dini & dasar di empat provinsi. PSPK merupakan lembaga yang secara aktif terlibat dalam penelitian pendidikan dan advokasi kebijakan pendidikan.

1.1. Merdeka Belajar : Transformasi Sistem Pendidikan Indonesia

Bahasa Indonesia: Pada tahun 2019 Indonesia memulai transformasi pendidikan yang dikenal sebagai Merdeka Belajar, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi setiap siswa. Pada tingkat K-12, tujuan ini diwujudkan sebagai peningkatan kemampuan membaca dan matematika siswa, bersama dengan berbagai keterampilan sosial-emosional yang penting untuk pembelajaran seumur hidup. Tujuan ini dirumuskan dalam kurikulum nasional, yang disebut Kurikulum Merdeka. Secara resmi, Kurikulum Merdeka diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 tahun 2024 mulai 27 Maret 2023. Dengan semangat transformasi pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan peraturan Keputusan Kemenag No. 450 tahun 2024 yang

memandu pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah. Peraturan ini mengatur pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada semua jenjang madrasah.

Kurikulum Merdeka melaksanakan Projek Penguatan Profil Siswa Pancasila (P5) untuk menyelaraskan siswa dengan prinsip-prinsip Pancasila. Proyek ini mendorong pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, pendidikan kesehatan, dan literasi keuangan. Bahasa Inggris diperkenalkan di sekolah dasar, dengan peningkatan bertahap menjadi wajib pada tahun 2027/ 2028. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa untuk berkomunikasi lintas budaya dan negara, meningkatkan keterampilan literasi, dan menyediakan akses ke pengetahuan terkini, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris.

Kurikulum Merdeka pertama kali diterapkan pada tahun ajaran 2021/2022, diujicobakan di beberapa sekolah yang terpilih dalam program pengembangan sekolah menyeluruh Kemendikbudristek, yaitu Program Sekolah Penggerak. Sekolah Program Penggerak bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera dan mandiri melalui pendidikan Pancasila. Sekolah Penggerak merupakan salah satu program Merdeka Belajar, dan program transformasi pendidikan lainnya yang signifikan adalah program Guru Penggerak.

Kemendikbudristek merekrut guru untuk menjadi “penggerak”, pemimpin yang menjadi motor penggerak perubahan. Mereka dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pendidik lain dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mereka menjadi panutan dan agen transformasi ekosistem pendidikan. Secara paralel, untuk mendukung upaya ini, Kemendikbudristek juga meninjau kembali standar kualifikasi guru.

Transformasi sistemik pendidikan juga diperkuat dengan sistem asesmen. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek meluncurkan Asesmen Nasional (AN). AN terdiri dari tiga bagian: kompetensi minimal keterampilan literasi dan numerasi (dikenal dengan istilah asesmen kompetensi minimal /AKM), survei karakter dan survei lingkungan belajar atau iklim sekolah. Hasil AN diserahkan ke sekolah dan Dinas Pendidikan di daerah melalui Rapor Pendidikan. Rapor Pendidikan menampilkan kondisi sekolah berdasarkan data AN dan survei yang melibatkan sekolah dan daerah. Sekolah dan pemerintah daerah didorong untuk menggunakan Rapor Pendidikan sebagai referensi dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akar permasalahan, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sistem pengambilan keputusan berbasis data sekolah ini pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan sebagai bagian dari inisiatif Merdeka Belajar. Dampak awal asesmen nasional mengungkapkan dua temuan utama: pertama, sekolah dengan tingkat literasi yang lebih tinggi cenderung menjadi pengadopsi awal kurikulum. Kedua, sekolah yang mengadopsi kurikulum baru juga menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dari tahun 2021 hingga 2023 dibandingkan dengan sekolah yang tidak¹.

¹ Berdasarkan makalah oleh Aditomo, Nino. "Meletakkan Fondasi Perubahan Sistemik dalam Pendidikan: Refleksi Reformasi Merdeka Belajar Indonesia." 2024. Makalah dapat diakses melalui: https://pskp.kemdikbud.go.id/file/kebijakan/1719449376_file.pdf

Kememag yang merupakan lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan madrasah juga memiliki penilaian serupa, yakni Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). AKMI telah berjalan sejak tahun 2021. Sama halnya dengan AN, salah satu tujuan AKMI adalah memetakan mutu pendidikan dan mengukur kompetensi peserta didik madrasah dalam literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya.

Selanjutnya, untuk membantu sekolah mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan, Kemendikbudristek menerbitkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan (Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023). Peraturan tersebut bertujuan untuk membantu sekolah dalam menangani kasus kekerasan di sekolah, baik kekerasan daring, psikis, maupun bentuk kekerasan lainnya yang berperspektif korban. Begitu pula dengan Peraturan Kementerian Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di madrasah. Peraturan tersebut mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di madrasah.

Hingga saat ini kebijakan tersebut telah dilaksanakan di sebagian besar sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek serta madrasah di bawah naungan Kemenag². Pendekatan sistemik untuk transformasi pendidikan. Data pemantauan dan evaluasi Kemendikbudristek menunjukkan bahwa sekolah dan administrator di tingkat daerah dan kabupaten/kota memerlukan dukungan untuk menyelaraskan semua kebijakan dan mewujudkan hasil yang diharapkan. Kajian ini dilakukan untuk menggali lebih jauh tentang kebutuhan serta potensi sekolah dan kabupaten/kota dalam melakukan transformasi pendidikan.

1.2 Tujuan dan Metodologi Penelitian Ini

Mitra Pendidikan Indonesia (MPI/LEG) telah menyetujui bahwa Hibah Pengganda GPE akan digunakan untuk mendukung transformasi pendidikan di delapan kabupaten, yaitu Nias Utara, Nias Selatan, Ketapang, Kayong Utara, Halmahera Utara, Kepulauan Morotai, Tanggamus, dan Pesisir Barat.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi kualitas keterampilan dasar di delapan kabupaten;
- b. mengeksplorasi tantangan, peluang, dan aspirasi untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum & penilaian, praktik pengajaran, kepemimpinan pendidikan, perlindungan anak serta pendidikan kesetaraan gender dan perubahan iklim di delapan kabupaten;
- c. mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kualitas keterampilan dasar, dan dukungan yang dibutuhkan di delapan kabupaten.

Untuk memahami analisis situasi pada kurikulum & penilaian, praktik pengajaran, kepemimpinan pendidikan, perlindungan anak serta pendidikan GEDSI dan perubahan iklim di pendidikan anak usia dini dan dasar. Penelitian ini dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan kunci, termasuk:

²Dalam laporan ini istilah “sekolah” digunakan untuk mewakili *sekolah* di bawah Kemendikbudristek dan madrasah di bawah Kemenag.

1. Bagaimana kualitas kurikulum & penilaian, praktik pengajaran, kepemimpinan pendidikan, perlindungan anak serta kesetaraan gender dan pengarusutamaan pendidikan perubahan iklim yang dialami oleh pemangku kepentingan lokal?
2. Apa saja tantangan, peluang, dan aspirasi untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum & penilaian, praktik pengajaran, kepemimpinan pendidikan, perlindungan anak serta pendidikan kesetaraan gender dan perubahan iklim di daerah?
3. Apa saja konsep dan strategi yang perlu dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan lokal untuk mencapai peningkatan pembelajaran berbasis kompetensi sesuai dengan konteks dan karakteristik daerah?
4. Dukungan apa yang mereka butuhkan untuk menerapkan strategi tersebut?

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui lokakarya, observasi sekolah, wawancara, dan studi pustaka tentang kebijakan pendidikan nasional dan lokal. Lokakarya tersebut menggunakan pendekatan penyelidikan apresiatif³ untuk mengidentifikasi kekuatan, keberhasilan, dan memberdayakan peserta untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Selama lokakarya, pemangku kepentingan utama di wilayah tersebut diidentifikasi berdasarkan kontribusi dan peran potensial mereka. Peserta mewakili tiga kelompok pemangku kepentingan pendidikan yang berbeda. Pertama, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Guru Penggerak (BGP), Kanwil Kemenag, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda atau Bapperida), Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Daerah (Dinas PU Perkim), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/DP3A. Kedua, perwakilan sekolah, yaitu kepala sekolah umum dan madrasah, mulai dari PAUD sampai SD, pengawas sekolah, dan guru. Ketiga, organisasi pendidikan daerah dan asosiasi guru. Perwakilan dari kelompok ini adalah, Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PTABM), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Guru Indonesia (IGI), Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah, LP Ma'arif NU, Ikatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), Perwakilan Organisasi Perempuan dan Disabilitas, Perwakilan Kepala Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

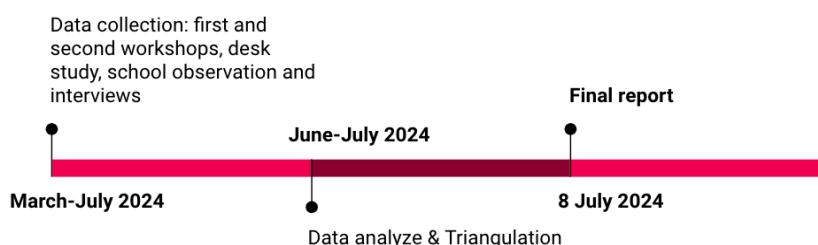
Observasi dan kunjungan sekolah dilakukan pada PAUD dan SD baik dari sekolah umum maupun madrasah. Studi pustaka juga dilakukan dengan mengkaji Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni SD), Rapor Pendidikan, AKMI, kebijakan nasional dan daerah seperti RPJMD, renstra dinas daerah seperti Dinas Pendidikan dan DP3A, kurikulum sekolah/madrasah, rencana pembelajaran, dan berbagai peraturan terkait seperti peraturan daerah tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan perlindungan anak. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan cara membandingkan dan mengontraskan temuan dari berbagai sumber termasuk hasil lokakarya pertama dan kedua di delapan kabupaten.

³Lokakarya Penyelidikan Apresiatif merupakan pendekatan positif terhadap pengembangan dan perubahan kelembagaan yang berfokus pada penghargaan dan pembangunan kekuatan serta keberhasilan yang sudah ada dalam suatu organisasi atau individu.

Temuan tersebut ditriangulasi dengan Rapor Pendidikan. Penyesuaian dilakukan berdasarkan spektrum 3 warna pada Rapor Pendidikan yang memberi label pada nilai tanggal. Ketiga spektrum warna tersebut adalah hijau yang berarti pencapaiannya baik atau tinggi. Kuning, yang berarti pencapaiannya sedang, dan merah, yang berarti pencapaiannya kurang atau rendah. Untuk literasi dan numerasi, pencapaian baik berarti lebih dari 70% siswa telah mencapai kompetensi minimum, sedang berarti hanya 40% - 70% siswa telah mencapai kompetensi minimum, rendah berarti kurang dari 40% siswa telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi.

Penyesuaian yang sama juga dilakukan untuk melakukan triangulasi hasil penilaian dengan asesmen AKMI. Dalam AKMI capaian dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) Perlu intervensi khusus, yaitu skor di bawah persentil tertentu (misalnya di bawah persentil 25%) yang menunjukkan peserta didik memiliki kesulitan yang cukup berarti pada kategori tersebut; (2) Dasar, yaitu skor antara persentil 25% sampai dengan 50% yang menunjukkan peserta didik memiliki pemahaman yang mendasar tetapi perlu ditingkatkan; (3) Mahir, yaitu skor antara persentil 50 sampai dengan 75 yang menunjukkan peserta didik memiliki kompetensi yang memadai; (4) Mahir, yaitu skor di atas persentil 75 yang menunjukkan peserta didik memiliki pemahaman dan keterampilan yang sangat baik pada kategori tersebut.

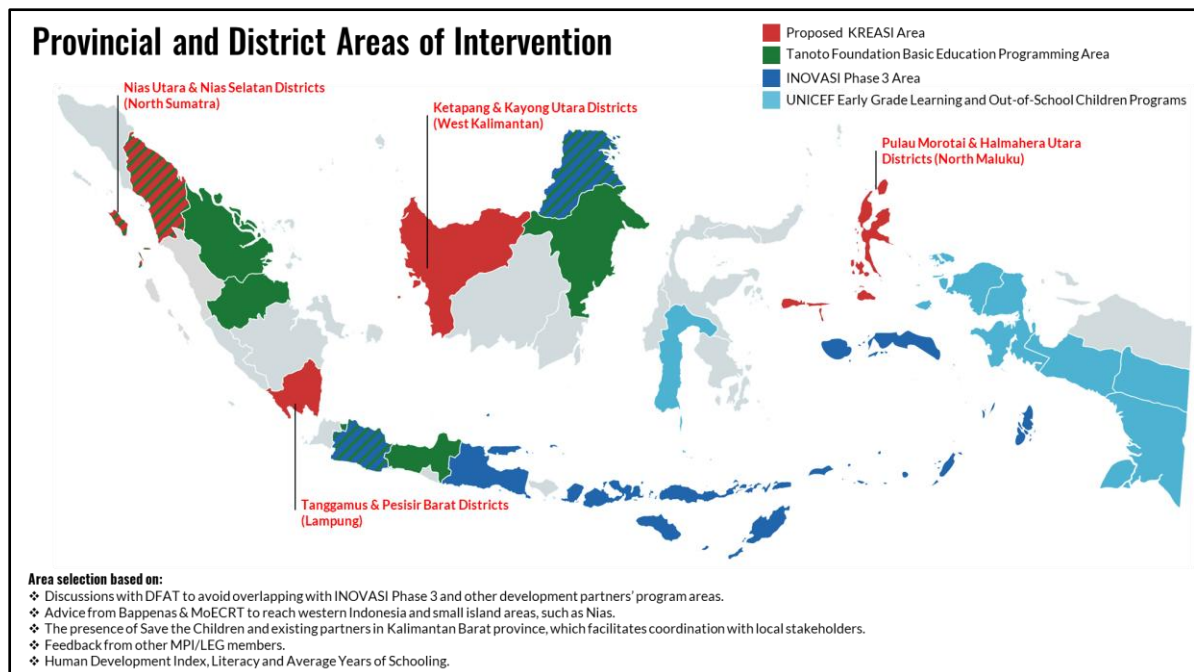
Garis waktu studi berlangsung dari Maret hingga Juli 2024. Garis waktu berikut mengilustrasikan proses studi.



Keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian menjadi kendala utama dalam penelitian ini. Dengan keterbatasan waktu pengumpulan data dan penyesuaian kalender sekolah, jumlah sekolah yang diobservasi pun terbatas, sehingga berdampak pada terbatasnya kesempatan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam melalui observasi dan wawancara mendalam. Meskipun demikian, penelitian ini mampu mengungkap kompleksitas transformasi pendidikan, khususnya di kabupaten-kabupaten dengan keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis, sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya dari laporan ini.

2. Temuan

Penelitian berlangsung di delapan kabupaten di empat provinsi, yaitu di Tanggamus dan Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Nias Utara dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara, Ketapang dan Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat, dan Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai di Provinsi Maluku Utara. Peta di bawah ini menggambarkan lokasi studi di empat provinsi di Indonesia.



Untuk menjawab pertanyaan tersebut, temuan difokuskan pada empat komponen: kurikulum dan asesmen, praktik pengajaran, kepemimpinan pendidikan, dan perlindungan anak. Analisis setiap komponen mempertimbangkan empat isu lintas sektor, yaitu: kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), dan perubahan iklim. Untuk memahami konteks kondisi pendidikan saat ini di setiap wilayah, kami juga mengkaji Rapor Pendidikan dan AKMI (Penilaian Kompetensi Madrasah Indonesia) di tingkat sekolah dasar.

Analisis tematik komponen kurikulum dan asesmen merupakan hasil analisis kebijakan kurikulum di tingkat nasional dan sub-nasional. Pemeriksaan juga mencakup kurikulum satuan pendidikan (KSP), visi misi sekolah, tujuan pembelajaran, penerapan Kurikulum Merdeka, penerapan kurikulum dan sumber belajar yang memperkuat capaian pembelajaran (literasi, numerasi, dan karakter) di sekolah/madrasah, dan penerapan asesmen baik pada jenjang taman kanak-kanak/sekolah dasar maupun sekolah/madrasah, serta isu lintas sektor seperti GEDSI dan perubahan iklim.

Analisis tematik pada komponen praktik pengajaran berasal dari analisis kebijakan lokal yang terkait dengan pengembangan kapasitas guru, pelaksanaan pembelajaran, pelatihan guru dan peran komunitas pembelajaran profesional dalam memfasilitasi guru dalam mengajar di tingkat taman kanak-kanak/sekolah dasar dan sekolah/madrasah serta isu lintas sektor (GEDSI dan perubahan iklim).

Analisis tematik pada komponen kepemimpinan pendidikan mencakup pengembangan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah dalam kepemimpinan instruksional, inisiatif untuk menumbuhkan budaya sekolah yang inklusif, dan keterlibatan kepala sekolah dalam komunitas pembelajaran profesional dan kelompok kerja di tingkat taman kanak-kanak/sekolah dasar dan sekolah/madrasah. Analisis ini juga mencakup isu lintas sektor seperti GEDSI dan perubahan iklim.

Terakhir, analisis tematik yang difokuskan pada komponen perlindungan anak diambil dari kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah dan sekolah. Analisis ini mempertimbangkan penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama pada jenjang TK/SD dan sekolah/madrasah, beserta isu lintas sektor seperti GEDSI dan perubahan iklim.

Temuan di empat provinsi yang berisi delapan kabupaten adalah sebagai berikut.

2.1. Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat

Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat merupakan dua daerah yang terletak di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus memiliki 464 PAUD dan 404 Sekolah Dasar (SD) serta 88 Taman Kanak-kanak (TK) dan 126 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pesisir Barat. Sementara itu, Raudhatul Athfal (RA) berjumlah 17 sekolah dan terdapat 56 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Pesisir Barat memiliki 9 RA dan 16 MI. Kedua kabupaten tersebut juga telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan perlindungan anak. Hal ini terlihat dari peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, dukungan terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dan siswa dari keluarga miskin. Implementasi peraturan tersebut masih menghadapi tantangan dalam praktiknya. Begitu pula dengan implementasi peraturan yang terkait dengan perlindungan anak dan hak anak.

Capaian indeks pembangunan manusia dan pendidikan di Tanggamus dan Pesisir Barat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa capaian IPM⁴ kedua kabupaten tersebut masih di bawah capaian Provinsi Lampung. Sementara itu, capaian lama sekolah yang diharapkan dan angka partisipasi murni di sekolah dasar masih di bawah capaian Provinsi Lampung. Namun, rata-rata lama sekolah Pesisir Barat lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Lampung dan Tanggamus. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya disparitas IPM dalam satu provinsi, dan perlunya percepatan peningkatan di kedua kabupaten tersebut. Tabel di bawah ini merangkum capaian IPM dan pendidikan Tanggamus dan Pesisir Barat.

Tabel 1. Capaian IPM dan pendidikan di Tanggamus dan Pesisir Barat

Aspek	Tanggamus	Pesisir Barat	Provinsi Lampung
Populasi	670,37 (ribuan) orang	172,32 (ribu) orang	9,05 (juta) orang
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023	68,79	68,79	71,25
Rata-rata tahun sekolah pada tahun 2023	7,36	8,70	8,29

⁴Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan pengukuran yang didasarkan pada perhitungan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup.

Aspek	Tanggamus	Pesisir Barat	Provinsi Lampung
Perkiraan tahun sekolah pada tahun 2023	12,31	12,14	12,77
Partisipasi murni sekolah dasar tahun 2023	88.97	80.87	91.37

Sumber: BPS, 2024

Temuan empat komponen dan regulasi di Tanggamus dan Pesisir Barat adalah sebagai berikut.

2.1.1. Banyak sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka, namun masih terdapat ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dan cara-cara untuk menghilangkan tes calistung⁵ dalam proses penerimaan siswa.

Penekanan pada pendidikan inklusif, kesetaraan gender, dan pendidikan karakter, menyoroti kekuatan praktik pendidikan saat ini dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Namun, kekuatan ini diimbangi oleh tantangan yang signifikan, termasuk desain kurikulum yang tidak lengkap di tingkat sekolah, pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, dan keterbatasan sumber daya. Pada tahun ajaran 2023-2024, hanya ada delapan sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Sejak Kurikulum Merdeka resmi diluncurkan sebagai kurikulum nasional, pada tahun ajaran baru 2024-2025, ada 464 PAUD dan 404 SD yang menerapkan Kurikulum Merdeka saat ini di Tanggamus. Dengan mengingat hal ini, kabupaten tersebut akan membutuhkan dukungan pada strategi untuk membantu sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

Untuk bidang literasi dan numerasi, Kabupaten Tanggamus telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi. Kabupaten ini memiliki Gerakan Literasi Daerah. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya literasi dalam ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. Di tingkat sekolah, pengaturan ini telah ditetapkan melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Sekolah memiliki kemandirian untuk melaksanakan GLS dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler dan atau ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas, dan bermitra dengan orang tua dan atau masyarakat. Ada pula inisiatif warga setempat di Tanggamus untuk meningkatkan literasi anak-anak di desa melalui program yang disebut rumah baca ⁶.

⁵ Calistung, yang merupakan singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung, biasanya dianggap sebagai indikator utama keberhasilan belajar anak. Tes ini biasanya dilakukan untuk penerimaan siswa baru di tingkat sekolah dasar. Ada kesalahpahaman di masyarakat dan guru tentang calistung, sehingga tes calistung telah dilarang melalui peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Siswa Baru.

⁶Lihat <https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/09/19/sosok-tamar-widadi-memupuk-literasi-di-pelosok-tanggamus>

Di Kabupaten Pesisir Barat, saat ini terdapat 68 PAUD dan 119 sekolah dasar yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua sekolah di Pesisir Barat menerapkan Kurikulum Merdeka. Begitu pula dengan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, yang membutuhkan dukungan dalam menyusun strategi untuk menerapkan kurikulum secara efektif di wilayahnya.

Untuk memperkuat ekosistem pendidikan antar berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Lampung, terdapat berbagai perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Beberapa kampus tersebut adalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Negeri Lampung, STKIP-PGRI Bandar Lampung. Kampus-kampus tersebut berpotensi menjadi mitra untuk meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten tersebut, melalui program pendidikan prajabatan guru, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Analisis aspek kurikulum dan penilaian mengungkap beberapa permasalahan utama dalam sistem pendidikan. Pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap Kurikulum Merdeka. Hal ini mungkin terkait dengan temuan lain bahwa guru masih belum memanfaatkan platform digital yang disediakan pemerintah, yaitu PMM⁷ dan PINTAR secara optimal⁸ sehingga mereka kurang memiliki informasi yang cukup tentang cara mengimplementasikan kebijakan baru dalam Kurikulum Merdeka. Kedua, terkait dengan penggunaan platform digital, keterbatasan akses internet dan kurangnya motivasi untuk menggunakan teknologi, menghambat pemahaman tuntutan kurikulum. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan program dukungan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap kurikulum. Strategi yang digunakan pemerintah untuk memperkenalkan kurikulum baru juga perlu ditingkatkan. Permasalahan geografis seperti lokasi pertemuan kelompok kerja guru yang jauh menjadi tantangan utama bagi guru untuk terus berpartisipasi dalam sesi kelompok kerja. Sementara itu, sebagian guru lainnya kurang memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam komunitas pembelajaran profesional.

Untuk literasi dan numerasi, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki Peraturan Bupati No. 44/2016 tentang Gerakan Literasi Sekolah, yang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas keterampilan literasi. Namun, perlu dikembangkan strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca dan numerasi karena Rapor Pendidikan menyarankan pemerintah untuk lebih fokus secara strategis dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar minimum, khususnya dalam numerasi.

Terkait literasi dini, guru-guru di pendidikan anak usia dini masih mengajarkan calistung meskipun pemerintah menyarankan sebaliknya. Praktik ini tetap ada karena harapan orang tua dan penilaian literasi yang diperlukan di beberapa sekolah dasar, berdasarkan kebijakan sekolah yang dihormati. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang transisi dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung)

⁷Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan platform teknologi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai media pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah dalam proses belajar mengajar, serta pengembangan profesi. PMM dapat diakses oleh madrasah.

⁸ PINTAR (Pusat Informasi Pelatihan & Pembelajaran) hadir sebagai wadah belajar bersama secara daring dan terbuka bagi seluruh PNS di lingkungan Kementerian Agama di Indonesia. PINTAR terdiri dari dua kategori pembelajaran, yaitu pelatihan dan pengetahuan, yang semuanya tersedia dalam bentuk artikel, video, dan materi untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas.

bukanlah keterampilan wajib bagi siswa pendidikan anak usia dini, seperti yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah. Pendaftaran peserta didik pendidikan anak usia dini di sekolah dasar negeri mengikuti sistem zonasi yang mempertimbangkan usia anak dan kedekatan dengan sekolah. Instruksi formal dalam kompetensi calistung diperuntukkan bagi siswa di tingkat sekolah dasar.

Untuk memahami pentingnya pendidikan perubahan iklim, penting untuk memahami lanskap sumber daya suatu wilayah. Lampung terkenal dengan keanekaragaman hayati yang kaya, menjadikannya provinsi yang penting dalam hal isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Wilayah ini memiliki berbagai sumber daya alam seperti perikanan, perkebunan kopi, kakao, dan pisang. Lampung adalah rumah bagi lumba-lumba dan gajah yang hidup di habitat aslinya. Perubahan iklim berpotensi memengaruhi kehidupan semua individu. Oleh karena itu, integrasi pendidikan perubahan iklim menjadi sangat penting. Data lapangan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang perubahan iklim dan pendidikan perubahan iklim di antara para peserta. Mereka menyadari adanya perpanjangan musim kemarau dan perubahan pola musim, tetapi tidak yakin bagaimana mengatasi masalah ini di kelas. Demikian pula, ada tantangan terkait GEDSI. Meskipun semua sekolah diharuskan mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus, terdapat kekurangan kompetensi untuk mendukung mereka secara efektif selama proses pembelajaran.

Dalam rangka mempersiapkan transisi menuju penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah dasar di Indonesia pada tahun ajaran 2027/2028, beberapa sekolah dasar telah menyelenggarakan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai muatan lokal untuk kelas 4, 5, dan 6. Sekolah telah mengangkat guru honorer⁹ untuk mengajar Bahasa Inggris karena pemerintah belum merekrut guru Bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan pembelajaran Bahasa Inggris adalah terbatasnya buku pegangan guru dan buku pendukung bagi siswa. Untuk mengatasi kendala tersebut, guru membuat lembar kerja untuk digunakan dalam pembelajaran. Dengan demikian, diperlukan dukungan yang mendasar bagi pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris, seperti kebijakan pemenuhan guru yang memadai, serta pemanfaatan berbagai sumber belajar.

2.1.2. Guru memprioritaskan literasi, numerasi, dan karakter sambil memasukkan kesadaran lingkungan; namun kurangnya pengembangan profesional dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama bagi efektivitas mereka.

Pada jenjang sekolah dasar, guru-guru terlibat dalam berbagai praktik terbaik untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter. Praktik-praktik ini meliputi pelaksanaan asesmen diagnostik, penetapan kesepakatan kelas, dan penggunaan metode pengajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa. Sementara itu, pada jenjang pendidikan anak usia dini, guru-guru menunjukkan praktik-praktik terbaik dengan mempertimbangkan latar belakang, kesiapan, dan gaya belajar siswa untuk menentukan metode pengajaran yang paling sesuai dan menarik bagi mereka. Lebih jauh, pada aspek pendidikan perubahan iklim, kedua jenjang pendidikan tersebut telah menunjukkan praktik-praktik yang berfokus pada pengintegrasian kesadaran lingkungan

⁹Guru honorer adalah guru kontrak dengan status non-PNS yang biasanya direkrut dan digaji oleh sekolah.

ke dalam kurikulum. Temuan-temuan mengenai kualitas pembelajaran ini juga tercermin dalam Rapor Pendidikan yang menunjukkan bahwa suasana kelas mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru.

Aspek praktik mengajar menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengajaran di bidang GEDSI dan perubahan iklim. Aspek ini mengidentifikasi tantangan seperti kurangnya pengembangan profesional bagi guru dan terbatasnya pemanfaatan sumber belajar yang beragam. Guru belum sepenuhnya mengakomodasi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran dan tidak memahami strategi pengajaran mereka. Beberapa guru menanggapi perubahan iklim hanya dalam kaitannya dengan sekolah Adiwiyata¹⁰ karena pendidikan perubahan iklim belum terintegrasi ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Guru memiliki keterbatasan ide dan sumber belajar untuk menerapkan pendidikan perubahan iklim.

Terkait akses ke praktik mengajar dari platform digital yang tersedia untuk mendukung pengembangan profesional guru, studi ini menemukan bahwa beberapa guru masih belum terbiasa menggunakan platform digital seperti PMM atau PINTAR. Hal ini dapat menjelaskan kesulitan mereka untuk secara efektif mengajarkan topik-topik yang kompleks seperti GEDSI dan perubahan iklim, dan selanjutnya berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Dalam hal sumber belajar, akses dan pemanfaatan sumber belajar yang beragam dalam praktik mengajar masih terbatas. Sekolah memiliki fasilitas dan program yang sangat terbatas untuk mendukung literasi dan numerasi seperti buku bacaan dan pojok baca, sementara beberapa sekolah masih belum memiliki ruang perpustakaan. Penggunaan SIBI¹¹ dan PMM yang dapat mendukung pembelajaran literasi dan numerasi belum ditemukan. Meskipun pengajaran kolaboratif didorong oleh kebijakan Kurikulum Merdeka, ditemukan bahwa kurangnya kerja sama antar guru juga menjadi hambatan dalam pertukaran ide dan sumber belajar. Tantangan lainnya adalah jarak antar sekolah yang menghambat kolaborasi melalui KKG atau kolaborasi antar sekolah.

2.1.3. Kepala sekolah mendukung pengembangan kurikulum, pengembangan profesional guru, dan memastikan keselamatan fisik dan psikologis siswa. Namun, kepala sekolah belum menjelaskan bagaimana data digunakan untuk membuat keputusan terkait perencanaan dan penganggaran.

Kepala sekolah telah menunjukkan berbagai praktik terbaik dalam mendukung pengembangan kurikulum dengan terlibat aktif dalam mengembangkan dan memantau kurikulum, mempertimbangkan unsur-unsur pendidikan inklusif dan perubahan iklim, baik dalam kebijakan maupun program sekolah. Mereka juga berfokus pada pengembangan profesional guru dengan menetapkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja guru. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang ideal, kepala sekolah memastikan keselamatan fisik dan psikologis siswa dan menjamin bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar. Kepala

¹⁰Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kepedulian warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan.

¹¹SIBI merupakan sistem informasi perbukuan Indonesia, sebuah platform resmi milik Kemendikbudristek untuk mengakses berbagai buku, baik buku teks maupun non-buku teks, untuk dibaca. Situs web SIBI dapat diakses melalui: <https://buku.kemdikbud.go.id/>

sekolah telah mendukung pengembangan kurikulum, pengembangan profesional guru, dan memastikan keselamatan fisik dan psikologis bagi siswa. Misalnya, beberapa kepala sekolah menerapkan pelatihan anti-perundungan untuk staf pengajar dan kebijakan untuk memastikan semua siswa merasa diterima dan dihargai. Mereka juga menyatakan bahwa mereka telah memperkenalkan kebijakan dan program untuk mendorong partisipasi aktif siswa perempuan dalam mata pelajaran Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), mempromosikan kepemimpinan siswa perempuan, dan memberikan pelatihan kepemimpinan, proyek sosial, atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kolaborasi, kejujuran, dan empati. Temuan ini diperkuat dengan capaian Rapor Pendidikan 2024 yang menyebutkan bahwa kepemimpinan instruksional telah mengarahkan visi dan misi sekolah, praktik dan penilaian pembelajaran berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik dengan program, sistem insentif atau sumber daya yang mulai mendukung guru untuk merefleksikan dan meningkatkan pembelajaran.

Akan tetapi, dalam hal perencanaan sekolah, masih banyak kepala sekolah yang belum memanfaatkan data berharga dari Rapor Pendidikan untuk perencanaan dan pengembangan. Beberapa bahkan tidak tahu bahwa data tersebut ada dan kurangnya kesadaran ini dapat menjelaskan ketidakefektifan strategi saat ini untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi. Banyak kepala sekolah belum mengadopsi pendekatan berbasis bukti dan memberikan guru pengembangan profesional yang diperlukan untuk memastikan siswa dibekali dengan keterampilan penting ini. Pelaksanaan program pengembangan kapasitas guru belum tuntas. Beberapa pemimpin sekolah mendorong pembelajaran mandiri melalui platform seperti PMM atau PINTAR, webinar, dan diskusi sekolah, namun praktik ini belum meluas.

Kinerja kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional juga menunjukkan perlunya perbaikan. Penerapan program kesejahteraan siswa seperti pembelajaran sosial emosional dan disiplin positif kurang optimal. Program-program ini tidak dilaksanakan di semua sekolah, menghambat pengembangan agensi siswa dan keterampilan kepemimpinan. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk memantau kegiatan pembelajaran dan kemajuan siswa terhadap tujuan yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dan implementasi aktual. Beberapa kepala sekolah berjuang untuk sepenuhnya mengintegrasikan kurikulum baru dan tidak memiliki sistem pemantauan yang jelas, sehingga sulit untuk melacak kemajuan dan menyesuaikan instruksi sebagaimana diperlukan. Kepala sekolah menunjukkan upaya yang tidak memadai dalam melaksanakan program yang terkait dengan GEDSI dan perubahan iklim. Sementara kepala sekolah menyatakan komitmen terhadap inklusivitas, mereka sering kali tidak memiliki tindakan dan rencana konkret untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Selain itu, pendidikan perubahan iklim belum terintegrasi ke dalam perencanaan kurikulum sekolah.

Temuan menunjukkan bahwa para pemimpin sekolah memerlukan dukungan untuk memahami Rapor Pendidikan guna membuat keputusan yang tepat dan mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Kurangnya komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah merupakan faktor penghambat dalam pengembangan kapasitas kepala sekolah. Selain itu, terdapat kurangnya kebijakan dan program di tingkat kabupaten untuk mendorong perencanaan peningkatan mutu sekolah berbasis data.

Lebih jauh, temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi yang saat ini digunakan untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah mungkin tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Hal ini menyoroti pentingnya para pemimpin sekolah untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan mereka guna memenuhi kebutuhan khusus siswa mereka secara efektif.

2.1.4. Sekolah mengadakan sesi kesadaran dan pelatihan tentang perlindungan anak, namun tidak ada kebijakan yang ketat tentang perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Sekolah telah mengadakan sesi penyadaran dan pelatihan mengenai perlindungan anak, namun kebijakan tentang perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi kurang bersifat mengikat. Para guru menggunakan metode yang lebih menarik untuk mengedukasi siswa mengenai perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Namun, kebijakan internal sekolah yang berkaitan dengan isu ini juga tidak cukup mengikat. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kekaburan dalam peraturan dan mekanisme pencegahan terkait kekerasan terhadap anak. Penerapan kebijakan perlindungan anak yang tidak konsisten di seluruh sekolah, di mana beberapa sekolah belum memulai proses pengembangan, menurunkan efektivitas upaya perlindungan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan kasus kekerasan dan dapat menyebabkan kesenjangan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi anak. Tanpa adanya peraturan yang jelas dan strategi pencegahan yang efisien, anak-anak tetap rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa layanan administratif untuk anak-anak di sekolah tidak beroperasi secara optimal. Hal ini mengisyaratkan bahwa mungkin terdapat inefisiensi atau kekurangan dalam penyediaan layanan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Ini sebagian besar disebabkan oleh kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas untuk anak-anak yang lahir di luar nikah (tidak diakui oleh negara karena berbagai alasan). Kinerja layanan administratif yang kurang optimal ini dapat menghambat pemberian respons yang tepat waktu dan sesuai terhadap masalah perlindungan anak yang timbul di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti rendahnya kesiapan sekolah untuk menghadapi bencana dan wabah penyakit. Kurangnya kesiapan ini dapat berdampak serius pada keselamatan dan kesejahteraan anak, terutama dalam situasi darurat. Beberapa sekolah telah mengalami bencana banjir beberapa kali, tetapi mereka menyadari perlunya peningkatan kapasitas mereka untuk mengelola banjir dan bencana lainnya, serta bekerja sama dengan masyarakat secara efektif. Tanpa perencanaan dan langkah-langkah kesiapan yang tepat, sekolah mungkin akan kesulitan dalam melindungi anak-anak secara efektif selama krisis, yang dapat membahayakan nyawa mereka. Analisis ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia sebagai faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kurang optimalnya perlindungan anak di sekolah.

2.1.5. Pemerintah daerah berkomitmen terhadap penyediaan pendidikan dan perlindungan anak dan pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk meningkatkan praktik

Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat telah menetapkan kebijakan pendidikan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus dan mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Kedua kabupaten tersebut mengatur kualifikasi guru, kurikulum, perlindungan anak, dan akses bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun, Kabupaten Tanggamus lebih spesifik dalam mengatur pengembangan kapasitas guru dan kepala sekolah, suatu aspek yang belum ditangani oleh Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pendidikan dilaksanakan secara efektif di kedua kabupaten tersebut.

Rekomendasi untuk mengatasi tantangan peningkatan mutu pendidikan di Tanggamus dan Pesisir Barat adalah sebagai berikut.

Kurikulum dan Penilaian:

1. Berkolaborasi dan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi (LPTK) untuk meningkatkan kualitas program prajabatan guru, melaksanakan penelitian, program pengabdian kepada masyarakat, serta program Kampus Merdeka. Pendekatan ini sekaligus akan memperkuat ekosistem pendidikan di antara berbagai pemangku kepentingan di daerah.
2. Meningkatkan sistem dukungan bagi sekolah untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka, termasuk menggunakan berbagai sumber belajar, mengakses platform digital yang disediakan pemerintah secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengembangkan sumber belajar kontekstual bagi siswa.
3. Menyediakan sumber bacaan yang memadai untuk literasi dan numerasi di taman kanak-kanak dan sekolah dasar dan mendorong guru untuk mengembangkan kegiatan belajar yang kreatif dan menyenangkan berorientasi literasi.
4. Mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum sekolah dan meningkatkan sistem dukungan dan kolaborasi dengan kantor lingkungan hidup dan sekolah Adiwiyata .
5. Meningkatkan dukungan untuk mengintegrasikan GEDSI dalam kurikulum dan kebijakan sekolah, misalnya kebijakan tingkat sekolah untuk mendukung guru membangun kapasitas pada pendidikan inklusif.

Praktik Mengajar

1. Penguatan Pengembangan Profesional Guru melalui komunitas belajar, PMM, KKG dan program relevan lainnya, termasuk memberikan pelatihan kepada guru tentang pendidikan inklusif dan perspektif kesetaraan gender.
2. Meningkatkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan menyediakan sumber daya belajar yang memadai untuk mendukung implementasi GEDSI dan pendidikan perubahan iklim.

Kepemimpinan pendidikan

1. Bappeda memimpin refleksi program pendidikan dengan para pemangku kepentingan dan mengembangkan perencanaan bersama berbasis data yang sesuai dengan kondisi setempat.
2. Meningkatkan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru dalam memahami dan menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang efektif.
3. Memperkuat komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal anggaran, kebijakan dan program terkait pengelolaan data di sekolah.
4. Memperkuat kepemimpinan instruksional kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan bimbingan untuk evaluasi kinerja.

Perlindungan Anak

1. Memperjelas peraturan dan mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak melalui program edukasi dan sosialisasi.
2. Memperkuat kapasitas sekolah untuk menangani perlindungan anak di sekolah dan untuk memulai program perlindungan anak.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara orang tua, siswa, dan guru dalam upaya perlindungan anak.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dan wabah penyakit melalui pelatihan dan simulasi. Dinas Pendidikan memfasilitasi kerja sama antara sekolah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan LSM yang peduli terhadap isu bencana dan perubahan iklim.

2.2. Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai

Kabupaten Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai merupakan wilayah pemekaran di Provinsi Maluku Utara. Halmahera Utara didirikan pada tahun 2003 sementara Kepulauan Morotai didirikan pada tahun 2008, sebelumnya tergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara memiliki 74 TK dan 211 SD, sedangkan Kepulauan Morotai memiliki 93 TK dan 70 SD. Di sisi lain, terdapat 73 RA dan 138 MI di Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Kepulauan Morotai memiliki 8 RA dan 14 MI. Seluruh pendidikan anak usia dini dan SD di Halmahera Utara telah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2024-2025. Akan tetapi, angka ini lebih rendah di Kepulauan Morotai. Saat ini, 65 sekolah dasar di Kepulauan Morotai telah melaksanakan Kurikulum Merdeka yang dimulai pada tahun ajaran 2024-2025. Oleh karena itu, sekolah-sekolah memerlukan dukungan untuk memastikan implementasi Kurikulum Merdeka dapat berlangsung secara optimal.

Tabel 2. Capaian IPM dan Pendidikan di Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai

Aspek	Halmahera Utara	Kepulauan Morotai	Maluku Utara
Populasi	202.755 orang	78.270 orang	1.319.338 orang
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023	69,05	64,73	70,21

Aspek	Halmahera Utara	Kepulauan Morotai	Maluku Utara
Rata-rata tahun sekolah pada tahun 2023	8,17	7,55	9,26
Perkiraan tahun sekolah pada tahun 2023	13,68	12,99	13,74
partisipasi murni sekolah dasar tahun 2023	83.43	85.59	97,36

Sumber: BPS, 2024

Tabel 2 secara umum mengindikasikan bahwa pencapaian IPM dan pendidikan di kedua kabupaten tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, kedua pemerintah daerah tersebut memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan level kesehatan, ekonomi, dan pendidikan di wilayah mereka masing-masing.

Temuan yang berkaitan dengan empat komponen dan regulasi di Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai adalah sebagai berikut:

2.2.1. Kurikulum sekolah telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan siswa sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini, yang mempromosikan pendekatan kontekstual dan pendidikan inklusif; namun guru perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang Kurikulum Merdeka.

Pada jenjang pendidikan dasar dan anak usia dini, sejumlah sekolah telah mengembangkan kurikulum dan penilaian dalam kurikulum sekolah. Fokusnya adalah memperbaiki metode pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tujuan siswa melalui pendekatan kontekstual. Untuk menjaga lingkungan belajar yang baik, beberapa sekolah telah berusaha menerapkan pendidikan inklusif. Di samping itu, guru telah menerima dukungan teknis untuk siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah telah berusaha untuk menyesuaikan dan memodifikasi kurikulum. Sementara itu, dalam pengembangan keterampilan literasi, sekolah telah menyediakan program pojok baca, kegiatan membaca selama 15 menit sebelum belajar, lomba literasi, dan kampanye literasi. Jenis penilaian yang telah dikembangkan meliputi penilaian portofolio, penilaian puisi/cerita pendek, serta penilaian sumatif dan formatif. Terkait dengan perubahan iklim, guru melakukan sosialisasi melalui stiker, spanduk, dan media sejenis untuk meningkatkan kesadaran mengenai perubahan iklim dan praktik penggunaan limbah bekas untuk daur ulang.

Untuk meningkatkan hasil literasi, terdapat berbagai komunitas literasi dan relawan di Halmahera Utara dan Kepulauan¹² Morotai . Kehadiran komunitas-komunitas ini sangat

¹²Lihat <https://kantorbahasamalut.kemdikbud.go.id/index.php/2024/03/18/kegiatan-bengkel-keterampilan-anggota-komunitas-literasi-di-kabupaten-pulau-morotai/>

penting untuk terlibat dalam pengembangan sistem pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam sistem pendidikan, termasuk kurangnya pemahaman guru terhadap Kurikulum Merdeka. Para guru tidak memahami prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, seperti merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian siswa. Selain itu, para guru kurang memahami pentingnya melakukan penilaian di awal pembelajaran untuk menyesuaikan pengajaran dengan kesiapan siswa.

Temuan ini menekankan pentingnya mengatasi tantangan-tantangan tersebut untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kurikulum dan penilaian yang mendukung kebijakan serta praktik di sekolah. Masalah lain yang diangkat dalam jumlah ini adalah tekanan dari orang tua dan fokus pada pengajaran keterampilan membaca di taman kanak-kanak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa para administrator tidak memberi tahu orang tua mengenai kebijakan transisi dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar.

Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa, sebuah studi dilakukan untuk mengamati sekolah yang menghargai pentingnya para siswa untuk mulai belajar bahasa Inggris. Sekolah tersebut telah mengambil langkah untuk menyediakan tambahan 2 jam/minggu untuk mata pelajaran bahasa Inggris, dengan guru yang berasal dari lembaga bahasa Inggris setempat, yang bekerja sebagai guru paruh waktu. Tantangannya terletak pada akses terhadap bahan pembelajaran dan keterbatasan anggaran yang menghalangi pembelian buku pegangan siswa dan buku bacaan bahasa Inggris untuk siswa. Sekolah-sekolah lain belum melakukan inisiatif semacam ini.

Maluku Utara memiliki potensi dan kebutuhan yang signifikan untuk pendidikan perubahan iklim. Provinsi ini kaya akan keanekaragaman hayati, dikenal dengan berbagai sumber daya alamnya seperti rempah-rempah, perikanan, hutan bakau, emas, dan pisang. Maluku Utara juga menjadi rumah bagi beberapa spesies endemik seperti burung bermata biru, kuskus, dan hiu. Selain itu, Maluku Utara merupakan wilayah dengan empat gunung berapi aktif yang rawan meletus. Wilayah ini terdiri dari banyak pulau kecil. Oleh karena itu, konektivitas antar wilayah terutama bergantung pada jalur laut. Perubahan iklim memengaruhi cuaca, mengganggu aktivitas pelayaran dan kehidupan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, integrasi pendidikan perubahan iklim menjadi sangat penting. Data dari lapangan menunjukkan bahwa terdapat kurangnya pemahaman tentang perubahan iklim dan pendidikan perubahan iklim di kalangan guru sekolah. Para guru menyebutkan bahwa mereka menghadapi kondisi cuaca buruk seperti gelombang tinggi dan badai, yang membuat mereka berisiko tinggi selama perjalanan ke sekolah. Namun, mereka tidak memiliki pemahaman tentang cara mengatasi situasi ini di kelas. Oleh karena itu, mengingat meningkatnya tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan bencana alam, sangat penting untuk membekali para guru dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dan mengatasi masalah ini. Mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum dan penilaian dapat membantu meningkatkan kesadaran, membangun ketahanan, serta memberdayakan siswa untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Situasi yang sama ditemukan pada GEDSI. Meskipun semua sekolah diharuskan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus, masih ada kekurangan dalam kompetensi sekolah untuk membantu mereka secara efektif dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah belum memiliki kebijakan untuk merancang kurikulum inklusif dan sistem yang memotivasi para guru dalam menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, sistem dukungan untuk kurikulum dan penilaian pada isu-isu GEDSI dapat disediakan dengan dorongan kebijakan di tingkat daerah, sekolah, dan kelas untuk membantu para guru dalam mengakomodasi semua siswa.

2.2.2. Guru menggunakan berbagai metode untuk mengajar kecakapan literasi dan numerasi; namun, kapasitas mereka untuk mengajar secara efektif perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Guru menerapkan praktik-praktik terbaik untuk meningkatkan kecakapan literasi, numerasi, dan pengembangan karakter siswa, termasuk menanamkan kebiasaan seperti berdoa, memberikan penilaian yang berpusat pada siswa, mempromosikan kesadaran perubahan iklim melalui simulasi, dan meningkatkan kecakapan literasi melalui sistem membaca wajib. Strategi-strategi ini didukung oleh pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja. Untuk pengembangan kecakapan literasi, inisiatif-inisiatif seperti mendirikan ruang pojok baca, pohon literasi, sesi membaca 15 menit sebelum pelajaran, kompetisi literasi, dan kampanye literasi telah dilaksanakan. Selain itu, ada Gerakan Literasi Sekolah (GLS).¹³ Namun, program GLS belum dilaksanakan secara optimal, dan penggunaan sumber daya pembelajaran seperti buku pelajaran dan buku non-pelajaran masih terbatas. Untuk mendukung potensi inisiatif literasi, di tingkat dasar, Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa guru telah mulai secara aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah meninjau ulang pembelajaran sebelumnya, mengeksplorasi referensi teknik-teknik pengajaran baru, dan menginovasi pelajaran-pelajaran yang merangsang keterlibatan siswa.

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa kualitas pengajaran dalam hal penilaian kinerja, Perlu perbaikan. Permasalahan yang ditemukan seperti kurangnya pengembangan profesionalisme guru dan pemanfaatan sumber belajar yang beragam. Penilaian kinerja belum dikaitkan dengan pelatihan yang pernah diikuti. Evaluasi kinerja guru belum berjalan optimal. Guru belum diperkenalkan dengan praktik penetapan tujuan, refleksi kemajuan, dan dialog dengan pimpinan sekolah untuk mengawasi pertumbuhan profesionalnya. Meskipun ada guru yang telah mengikuti pelatihan PMM dan webinar, namun belum dikaitkan dengan penilaian kinerja karena konsepnya baru mulai diperkenalkan pada tahun 2024. Banyak guru juga belum mengakses PMM atau PINTAR untuk meningkatkan evaluasi kinerjanya. Beberapa kendala yang ada adalah sarana dan prasarana, kondisi geografis, dan guru masih menganggap beban administrasi menjadi salah satu alasan tidak menindaklanjuti pelatihan untuk dijadikan penilaian kinerja.

¹³Gerakan literasi sekolah (GLS) merupakan suatu upaya atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, staf sekolah, dan tata usaha sekolah). (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, tata usaha sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat. Sasaran GLS adalah mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang warganya melek huruf sepanjang hayat yaitu pembiasaan membaca peserta didik.

Studi ini juga mengidentifikasi bahwa pendidikan perubahan iklim, implementasi pendidikan perubahan iklim bervariasi. Sementara beberapa sekolah telah mulai mengintegrasikan aspek-aspek perubahan iklim ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler mereka, seperti mempromosikan kebiasaan makan sehat dan kebersihan lingkungan, yang lain menunjukkan bukti terbatas dari inisiatif tersebut. Dalam beberapa kasus, pendidikan perubahan iklim disebutkan secara sporadis dalam beberapa mata pelajaran atau dokumen sekolah, terutama berfokus pada isu-isu seperti kebersihan sekolah dan kearifan lokal. Kolaborasi dengan lembaga eksternal, seperti otoritas manajemen bencana, menunjukkan upaya menuju keterlibatan dan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, integrasi keseluruhan pendidikan perubahan iklim di seluruh efisiensi energi, pengelolaan limbah, transportasi, dan kebijakan sekolah masih tidak konsisten atau tidak ada di beberapa sekolah. Oleh karena itu, perlu menyoroti area untuk perbaikan dalam pendidikan perubahan iklim yang komprehensif.

Terkait aspek GEDSI, analisis menunjukkan praktik pengajaran di GEDSI belum terintegrasi dengan baik. Guru belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman siswa atau menerapkan kesetaraan gender dalam pembelajaran. Guru menggunakan beragam metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, yang menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran yang dipersonalisasi dan komunikasi intensif dengan orang tua. Namun, dalam kasus lain, guru terutama mengandalkan instruksi yang berpusat pada guru, yang menunjukkan perlunya eksplorasi dan implementasi lebih lanjut terhadap pendekatan yang berpusat pada siswa dan untuk mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus di seluruh sekolah. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk memupuk keterampilan guru untuk menerapkan pembelajaran yang dibedakan dan pembelajaran yang inklusif untuk pembelajaran siswa di semua sekolah.

2.2.3. Kapasitas pemimpin sekolah dalam kepemimpinan instruksional perlu ditingkatkan dengan penggunaan data untuk proses pengambilan keputusan.

Kepemimpinan pendidikan telah menunjukkan berbagai praktik efektif dalam mendukung pengembangan kurikulum. Pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), kepala sekolah telah menciptakan lingkungan dan pendekatan pembelajaran yang ramah anak, menerapkan kurikulum partisipatif yang menekankan pendidikan agama dan penguatan positif bagi anak. Pada jenjang sekolah dasar, kepala sekolah menciptakan lingkungan pembelajaran yang mengutamakan pendidikan karakter, toleransi, disiplin, mengakomodasi kebutuhan dan minat anak, serta mengembangkan metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kepala sekolah pada jenjang PAUD menggunakan data kompetensi guru dan laporan pembelajaran triwulan. Hal ini juga ditegaskan dari Rapor Pendidikan tahun 2024 bahwa kepemimpinan pendidikan telah mulai mengarah pada kepemimpinan instruksional yang visioner dengan secara konsisten mengacu pada visi-misi sekolah dan berupaya mengomunikasikannya kepada warga sekolah.

Namun, analisis aspek kepemimpinan pendidikan mengungkap beberapa tantangan utama yang perlu ditangani untuk manajemen sekolah yang efektif. Pertama, perlu dicatat bahwa pemanfaatan data laporan pendidikan belum dioptimalkan di sekolah. Hal ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan dalam memanfaatkan proses pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan hasil pendidikan. Selain itu, studi ini menyoroti bahwa beberapa kepala sekolah telah menggunakan data Rapor Pendidikan untuk mengembangkan rencana

strategis dan meningkatkan kualitas sekolah. Namun, masih banyak yang belum melakukannya. Situasi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal. Pemahaman kepala sekolah yang terbatas tentang Rapor Pendidikan menjadi salah satu alasan utama tidak memanfaatkan data secara optimal.

Kedua, supervisi terhadap guru masih belum merata, sehingga perlu adanya mekanisme monitoring dan dukungan yang lebih konsisten dan menyeluruh bagi para pendidik. Faktor penyebabnya adalah masih adanya kepala sekolah yang belum memahami peran manajerial. Hal ini dibuktikan dari hasil Rapor Pendidikan yang menyatakan bahwa kepemimpinan sekolah yang tidak didukung oleh kompetensi yang memadai (tidak memiliki sertifikat pendidik) menghambat kinerja kepala sekolah.

Lebih lanjut, kualifikasi kepala sekolah disebutkan belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sebab, pengangkatan kepala sekolah tidak dilakukan secara selektif melalui ujian/tes. Ketidacukupan ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa para pemimpin sekolah memiliki keahlian dan kualifikasi yang esensial untuk memimpin sekolah secara efektif. Selain itu, integrasi pendidikan perubahan iklim dan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam kurikulum sekolah (*Kurikulum satuan pendidikan* (KSP) dinilai belum optimal. Hal ini menyoroti perlunya strategi yang lebih komprehensif dan terpadu untuk mengintegrasikan topik-topik penting ini ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah.

Orang tua di Maluku Utara memiliki budaya menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan anak, sehingga kekerasan terhadap anak sering tidak dilaporkan. Jika dilaporkan, hal itu akan menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, perlu untuk memperkenalkan disiplin positif dan melibatkan pemimpin agama atau adat dalam proses ini. Untuk memastikan sekolah aman dan pembelajaran yang kondusif, kepala sekolah harus mendorong penerapan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif adalah membangun karakter siswa tanpa hukuman dan mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab atas pilihan. Dalam beberapa kasus masih ada hukuman di sekolah. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan perlu mempromosikan disiplin positif di sekolah dan orang tua.

2.2.4. Peraturan dan kelompok kerja tentang kekerasan anak telah ditetapkan, namun strategi dukungan saat ini untuk perlindungan anak di sekolah belum memadai.

Terdapat berbagai praktik baik dalam perlindungan anak, terbukti dari adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang kekerasan terhadap anak. Terdapat kelompok kerja yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, seperti DP3AKB yang bekerja sesuai dengan SOP penanganan kasus kekerasan. Capaian pada jenjang sekolah dasar dalam Rapor Pendidikan tahun 2024 menunjukkan bahwa sekolah memiliki lingkungan yang aman, kesejahteraan psikologis yang baik, serta rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, dan kekerasan seksual. Saat ini, TPPK telah terbentuk, namun pemahaman tentang TPPK masih kurang karena sosialisasi yang kurang, sehingga sekolah belum memiliki SOP yang tepat untuk menangani masalah perlindungan anak. Selain itu, stigma masyarakat masih menjadi kendala, karena kasus kekerasan masih dianggap sebagai aib keluarga. Masyarakat lebih memilih hukum adat dibandingkan dengan peraturan yang ada.

Program terkait perlindungan anak yang telah dilaksanakan antara lain *Ceria* (Cegah Perkawinan Anak), DP3A Goes To School, serta pelibatan Forum Anak, Kepala Desa, dan tokoh agama.

Masalah utama pertama yang diidentifikasi dalam analisis ini adalah strategi dukungan yang kurang optimal untuk perlindungan anak di sekolah. Halmahera Utara merupakan daerah bencana gunung berapi. Beberapa sekolah menanggapi masalah ini dengan serius, seperti menyediakan masker dan bekerja sama dengan orang tua saat terjadi bencana. Namun, praktik baik ini belum diterapkan di semua sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah dan mekanisme yang ada untuk melindungi anak-anak di lingkungan sekolah belum sepenuhnya efektif atau efisien. Hal ini menyiratkan bahwa mungkin ada kesenjangan atau kekurangan dalam kebijakan, prosedur, dan praktik yang saat ini diterapkan untuk melindungi anak-anak dari bahaya atau pelecehan saat berada di sekolah. Hal ini menyoroti perlunya tinjauan komprehensif dan potensi perombakan kerangka kerja perlindungan anak yang ada dalam lembaga pendidikan.

Masalah kedua berkisar pada kurangnya pemahaman tentang Kebijakan Perlindungan Anak (TPPK) dan Prosedur Operasional Standar (SOP) penanganan kasus perlindungan anak di sekolah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang krusial di kalangan staf sekolah, administrator, dan bahkan mungkin siswa dan orang tua mengenai protokol dan pedoman yang harus diikuti ketika menangani masalah perlindungan anak. Tanpa pemahaman yang jelas tentang TPPK dan SOP, terdapat risiko salah penanganan atau mengabaikan masalah perlindungan anak, yang berpotensi menempatkan anak pada risiko lebih lanjut untuk mengalami kekerasan atau penelantaran.

Isu penting ketiga yang disorot dalam analisis ini adalah stigma sosial seputar kekerasan terhadap anak. Stigma ini dapat terwujud dalam berbagai cara, seperti menyalahkan korban, tidak percaya pada maraknya pelecehan anak, atau keengganan untuk melaporkan dugaan kasus pelecehan atau penelantaran. Adanya stigma tersebut dapat menciptakan hambatan untuk menangani dan mencegah pelecehan anak secara efektif di dalam masyarakat dan dapat berkontribusi pada kurangnya pelaporan dan kurangnya pengakuan terhadap isu perlindungan anak.

2.2.5. Kepulauan Dinas Pendidikan Morotai menghimbau agar transisi dari PAUD ke SD berjalan lancar, ujian calistung dihentikan, dan penggunaan Rapor Pendidikan di sekolah dasar dihentikan. Namun, regulasi yang ada belum mendukung secara efektif inisiatif ini, mengingat belum adanya dukungan yang kuat dari para pemangku kepentingan.

Analisis kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kedua kabupaten tersebut belum memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Namun, ada peraturan lain yang mengatur tentang pendidikan. Peraturan daerah tersebut meliputi peraturan daerah tentang perlindungan anak dan kota layak anak. Oleh karena itu, untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan anak yang lebih baik, pemerintah daerah harus mengembangkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan anak. Kepala Daerah Kepulauan Dinas Pendidikan Morotai telah mengeluarkan surat edaran berupa himbauan agar transisi PAUD ke SD berjalan lancar, agar sekolah dasar tidak menyelenggarakan ujian calistung

dan penggunaan Rapor Pendidikan. Namun, peraturan ini belum kuat karena belum mengatur peran, tugas, dan sanksi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rekomendasi untuk mengatasi tantangan peningkatan mutu pendidikan di Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai adalah sebagai berikut.

Kurikulum dan Penilaian

1. Meningkatkan sistem dukungan sekolah untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka dan penggunaan Rapor Pendidikan melalui pengaktifan komunitas pembelajaran profesional.
2. Meningkatkan sistem pendukung bagi sekolah untuk mengintegrasikan GEDSI dan perubahan iklim melalui pengaktifan komunitas pembelajaran profesional. Serta mendukung penggunaan Awan Penggerak di daerah 3T.
3. Sosialisasi kepedulian orang tua terhadap literasi dan numerasi serta penerapan PAUD Integratif secara holistik.
4. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen dan Penyelenggaraan Pendidikan serta mengesahkan kebijakan yang memfasilitasi inklusivitas dan menanggulangi perubahan iklim di lingkungan lembaga pendidikan.
5. Berkolaborasi dengan komunitas literasi dan relawan untuk meningkatkan hasil literasi dan membangun ekosistem pendidikan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Praktik Mengajar

1. Memperkuat program literasi sekolah di semua sekolah dengan memastikan implementasi yang optimal.
2. Meningkatkan pemanfaatan berbagai sumber belajar dan buku teks/non teks dalam pembelajaran serta memberikan pelatihan kepada guru untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan berbagai metode pengajaran yang menyenangkan.
3. Dorong guru untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan hindari menyediakan lembar kerja sebagai satu-satunya sumber pembelajaran.
4. Memberikan pelatihan guru untuk mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim dalam pengajaran, termasuk bekerja sama dengan Kantor Lingkungan Hidup dan program sekolah Adiwiyata .
5. Memberikan pelatihan kepada guru tentang pendidikan inklusif dan penerapan pembelajaran terdiferensiasi.

Kepemimpinan pendidikan

1. Bappeda memimpin refleksi program pendidikan dengan para pemangku kepentingan dan mengembangkan perencanaan bersama berbasis data yang sesuai dengan kondisi setempat.
2. Meningkatkan pemanfaatan data Rapor Pendidikan untuk identifikasi, refleksi, perencanaan strategis, dan peningkatan mutu sekolah.
3. Memperkuat pemahaman kepala sekolah tentang peran manajerial sumber daya manusia dan pentingnya pengawasan guru serta memperkuat kebijakan pemerintah tentang evaluasi kinerja guru.

4. Memberikan bimbingan kepada kepala sekolah, kelompok kerja guru dan guru dalam manajemen sekolah berbasis data, supervisi guru, integrasi pendidikan perubahan iklim dalam implementasi KSP dan GEDSI.
5. Mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penerapan pendidikan inklusif dan perubahan iklim.
6. Dorong kepala sekolah untuk mempromosikan dan menerapkan disiplin positif di sekolah.

Perlindungan Anak

1. Memperkuat sosialisasi dan edukasi tentang TPPK, SOP penanganan kasus perlindungan anak, hak anak, dan perlindungan anak kepada semua pihak terkait. Meningkatkan anggaran untuk program perlindungan anak di sekolah dan memanfaatkan tenaga ahli, tokoh agama, kepala desa, tokoh adat yang ada untuk mendukung program perlindungan anak di sekolah.
2. Membina kemitraan antara pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung regulasi, memfasilitasi upaya sosialisasi, dan meningkatkan koordinasi antar organisasi terkait.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat jaringan dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.3. Ketapang dan Kayong Utara

Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berada di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang memiliki 464 TK dan 543 SD, sedangkan Kabupaten Kayong Utara memiliki 48 TK dan 107 SD. Sementara itu, di Kabupaten Ketapang terdapat 183 RA dan 439 MI. Di Kabupaten Kayong Utara terdapat 5 RA dan 10 MI. Di Ketapang terdapat 33 TK dan 76 SD yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak. Sementara itu, di Kayong Utara terdapat 2 TK yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak dan tidak ada satu pun pada jenjang SD. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mendukung sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Capaian IPM dan pendidikan di kabupaten Ketapang dan Kayong Utara masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Barat (lihat Tabel 3). Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi agar IPM dapat meningkat. Khususnya dalam hal angka partisipasi murni sekolah dasar, kinerja kabupaten Kayong Utara lebih baik dibandingkan kinerja kabupaten Ketapang dan provinsi Kalimantan Barat., Kayong Utara is performing better than Ketapang and Kalimantan Barat province.

Tabel 3. Capaian IPM dan pendidikan di kabupaten Ketapang dan Kayong Utara

Aspek	Ketapang	Kayong Utara	Kalimantan Barat
Populasi	592 521 orang	132 855 orang	5 623 328 orang
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023	68,68	64,79	69,41

Aspek	Ketapang	Kayong Utara	Kalimantan Barat
Rata-rata tahun sekolah pada tahun 2023	7,55	6,35	7,71
Perkiraan tahun sekolah pada tahun 2023	11,96	12,12	12,67
Partisipasi murni sekolah dasar tahun 2023	97,38	98,14	97,70

Sumber: BPS, 2024

Temuan terkait keempat komponen dan peraturan di kabupaten Ketapang dan Kayong Utara adalah sebagai berikut:

2.3.1. Reformasi Merdeka Belajar berpotensi untuk mengubah hasil pendidikan secara inklusif. Memperkuat komunitas pembelajaran profesional dan memberikan dukungan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian dan bantuan.

Sekolah-sekolah banyak yang mulai menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2023. Meskipun siswa sangat antusias untuk belajar, ada kebutuhan untuk membantu sekolah memahami prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Setelah jam mengajar, para guru berkolaborasi untuk menyiapkan pelajaran dan merancang kelas mereka agar menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan. Namun, dokumen rencana pelajaran mereka belum menunjukkan hubungan yang kuat antara tujuan pembelajaran, penilaian, dan metode yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep desain mundur dalam Kurikulum Merdeka belum diterapkan. Desain mundur dalam perencanaan pelajaran adalah pendekatan desain instruksional di mana guru memulai pengajaran dengan menetapkan tujuan akhir (hasil pembelajaran yang diinginkan) dan bekerja mundur untuk mengembangkan strategi dan penilaian instruksional untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut (Wiggins dan Mc. Tighe, 2005).

Ada upaya untuk menerapkan teknik-teknik pembelajaran interaktif, mempromosikan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pengembangan karakter, dan para guru mulai menyadari keberadaan aplikasi PMM. Namun, banyak guru tidak menyadari bahwa semua rencana pelajaran yang disimpan dalam aplikasi PMM dapat diakses untuk digunakan atau disesuaikan di kelas. Dengan kata lain, pada awal pelaksanaan Kurikulum Merdeka, guru memerlukan waktu untuk memahami prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, kini mereka dapat menghemat waktu dalam menyusun rencana pembelajaran dengan memanfaatkan rencana-rencana pembelajaran yang tersedia dalam aplikasi PMM dan PINTAR. Hal ini memungkinkan para guru untuk lebih fokus pada proses belajar mengajar di kelas. Kondisi geografis di daerah terpencil yang menyebabkan terbatasnya akses informasi dan internet juga perlu diatasi. Dengan demikian, para guru dapat memperoleh informasi dan sumber daya pembelajaran yang memadai untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penilaian pembelajaran. Penggunaan platform Awan Penggerak di daerah-daerah terpencil sangat dianjurkan. Komitmen yang lebih kuat dan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan semua pemangku

kepentingan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Selain itu, ada potensi yang besar untuk meningkatkan hasil literasi siswa di kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Berbagai komunitas dan pegiat literasi di Ketapang seperti Rumah Literasi Indonesia dan rumah baca berkontribusi pada upaya ini. Jadi, mengembangkan jaringan dengan para pegiat literasi dapat memperkuat ekosistem pendidikan.

Salah satu temuan utama dalam penelitian adalah bahwa pemahaman guru tentang penilaian perlu ditingkatkan. Ini penting karena penilaian berperan krusial dalam mengukur kemajuan pembelajaran dan pemahaman siswa. Tanpa pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip penilaian, guru mungkin kesulitan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan siswa mereka secara akurat, yang menyebabkan potensi kesenjangan dalam hasil pembelajaran. Beberapa sekolah telah melakukan penilaian di awal proses pembelajaran. Namun, penilaian tersebut umumnya ditujukan untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dan tingkat kompetensi siswa. Masih ada kesalahan konsepsi yang umum tentang gaya belajar. Banyak yang mempercayai bahwa seseorang memiliki satu gaya belajar dominan (misalnya visual, auditori, atau kinestetik), dan bahwa mengajar dengan gaya tersebut akan menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Miskonsepsi ini perlu ditangani karena peserta didik sering kali mendapatkan manfaat dari berbagai pendekatan pengajaran daripada dibatasi pada satu gaya tertentu.

Lebih lanjut, beberapa sekolah mewajibkan guru untuk memiliki catatan atau dokumentasi tentang kemajuan siswa mereka, namun pemanfaatan catatan tersebut belum diterapkan untuk menyesuaikan metode pengajaran. Beberapa guru memiliki catatan atau dokumentasi mengenai siswa yang bermasalah, tetapi pemakaiannya belum digunakan untuk menyesuaikan metode pengajaran. Di sisi lain, beberapa sekolah tidak mencatat kemajuan belajar siswa. Ini menunjukkan bahwa penerapan penilaian formatif memerlukan dukungan dan bimbingan dari pemerintah.

Sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, beberapa sekolah telah mendirikan ruang pojok baca dan menyediakan bahan bacaan. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal variasi buku yang disediakan di ruang tersebut. Sekolah-sekolah ini tidak menyadari adanya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI), sebuah platform yang menawarkan buku-buku sesuai usia dalam berbagai genre dan tingkat kemampuan membaca untuk memenuhi berbagai minat dan kemampuan membaca.

Komunitas pembelajaran profesional seperti KKG dan KKKS memang ada, tetapi untuk meningkatkan kualitas waktu pertemuan mereka, pemerintah perlu membantu kelompok-kelompok tersebut dalam mendorong sesi perencanaan pelajaran kolaboratif di mana para guru dapat bertukar ide, sumber daya, dan umpan balik, yang mendukung budaya kolaborasi dan inovasi. Pemerintah menetapkan program bimbingan, yang menugaskan guru-guru berpengalaman di lembaga-lembaga pendidikan baru untuk menawarkan bimbingan, dukungan, dan kesempatan pengembangan profesional, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi, untuk memberikan masukan tentang aspek-aspek yang perlu ditingkatkan.

Akses pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas diatur dalam peraturan perlindungan anak. Terdapat sekolah-sekolah untuk anak-anak

berkebutuhan khusus baik negeri maupun swasta di kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Namun, data mengenai sekolah-sekolah inklusif belum ada. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan strategi-strategi yang lemah dalam pendidikan inklusif di sekolah-sekolah. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Namun, analisis menunjukkan bahwa strategi-strategi yang saat ini diterapkan dalam pendidikan inklusif masih kurang memadai.

Di sisi lain, upaya pendampingan siswa berkebutuhan khusus juga telah dilakukan di Kabupaten Ketapang. Namun, perlu ada dukungan kepada sekolah untuk melakukan skrining dan asesmen dini guna mengidentifikasi potensi tanda-tanda kebutuhan khusus atau kesulitan belajar, melakukan observasi terhadap siswa, dan berkomunikasi dengan orang tua atau wali untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan siswa dan masalah-masalah yang mungkin mereka alami.

Untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai perubahan iklim, penting untuk memasukkan pendidikan tentang perubahan iklim dalam kurikulum dan sistem sekolah. Program sekolah Adiwiyata yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didedikasikan untuk mempromosikan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan kepada siswa. Banyak sekolah telah berpartisipasi dalam program ini, dan disarankan lebih banyak sekolah bekerja sama dengan sekolah Adiwiyata agar dapat mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim secara efektif.

Beberapa organisasi non-pemerintah telah menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah mengenai pendidikan tentang perubahan iklim, seperti Pongo Ranger dan Yayasan Alam Lestari. Potensi baik ini harus dikembangkan agar bisa membantu sekolah dalam mengintegrasikan isu-isu seperti kebakaran hutan, pertambangan, kepunahan Orang Utan, dan spesies terancam punah lainnya akibat perubahan iklim ke dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan materi pembelajaran untuk para guru dan atau bacaan bagi siswa. Dengan mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan pendidikan perubahan iklim, sekolah bisa meningkatkan kesadaran dan memberdayakan siswa.

Sekolah-sekolah perlu menyertakan pendidikan perubahan iklim dalam praktik pengajaran mereka untuk mempersiapkan siswa menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Jumlah guru di kedua daerah tersebut masih belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mengirim guru-guru mengikuti program sertifikasi atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi setempat atau Universitas Terbuka.

Untuk pelajaran Bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar, banyak sekolah telah menjadikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam penerapan kurikulum 2013. Sebagian besar dari mereka menyatakan senang karena Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib dalam Kurikulum Merdeka. Bagi sekolah yang belum mengimplementasikan pelajaran Bahasa Inggris, tantangannya terletak pada kemampuan dan ketersediaan para guru. Namun, mereka berusaha untuk memperkenalkan pelajaran Bahasa Inggris dengan menerapkan materi

pembelajaran untuk siswa kelas 3 SD. Ini merupakan indikasi positif dari penerapan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi.

2.3.2. Guru menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan P5. Namun, guru perlu peningkatan dalam hal pemanfaatan program PMM/PINTAR dan P5, asesmen formatif, yang memasukkan strategi pendidikan inklusif, dan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan pendidikan perubahan iklim.

Di kedua kabupaten tersebut, para guru telah melaksanakan asesmen diagnostik untuk menilai kesiapan siswa dan mengatur pembelajaran terdiferensiasi dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar dan minat mereka. Temuan ini sejalan dengan pencapaian Rapor Pendidikan 2024 di jenjang sekolah dasar. Rapor Pendidikan tersebut menyampaikan bahwa pembelajaran mulai menuju peningkatan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan suasana kelas yang lebih mendukung dan dukungan afektif dari guru.

Para guru memerlukan bantuan dalam penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Mengingat banyak guru yang masih berada pada tahap awal dalam memahami prinsip Kurikulum Merdeka, penting bagi mereka untuk menyadari bahwa mereka tidak diwajibkan untuk menyusun rencana pembelajaran mereka sendiri. Mereka hanya perlu memanfaatkan rencana pembelajaran yang terdapat di aplikasi PMM atau PINTAR. Setelah mereka memahami prinsip Kurikulum Merdeka, mereka dapat menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kebutuhan siswa mereka. Komunitas pembelajaran profesional adalah sarana terbaik bagi para guru untuk belajar dan berbagi praktik terbaik.

Hal lain yang perlu dicatat adalah kurangnya pemahaman guru tentang penilaian formatif. Penilaian formatif sangat penting dalam memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan strategi pengajaran. Analisis menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai praktik penilaian formatif guna meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan kepada guru, sekolah dapat memastikan bahwa penilaian formatif terintegrasi secara efektif ke dalam proses pengajaran.

Dalam penerapan P5, paradigma guru tentang proses P5 perlu bergeser fokus ke pembelajaran, bukan hanya pada produk. Para guru dapat membiasakan diri dengan indikator-indikator dan rubrik penilaian dalam P5 untuk membimbing pengembangan siswa terkait nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa contoh P5 yang tersedia di platform PMM yang dapat dirujuk oleh para guru. Komunitas pembelajaran profesional seperti KKG baik di tingkat sekolah maupun kabupaten, atau asosiasi guru, adalah tempat yang terbaik untuk belajar tentang PMM secara mandiri.

Evaluasi kinerja guru dilakukan dengan memanfaatkan sistem e-kinerja BKN dan PMM, yang diawasi oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah.

Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 14,6 juta hektar, di mana 56,65 persen di antaranya merupakan kawasan hutan dan memiliki sungai-sungai besar seperti sungai Kapuas¹⁴. Hutan-hutannya kaya akan berbagai keanekaragaman hayati seperti orangutan, bekantan, beruang madu, dan berbagai jenis burung yang menghuni daerah tersebut. Keberadaan hewan-hewan ini terancam punah, yang mengancam ekosistem yang diperburuk oleh perubahan iklim. Dengan demikian, pendidikan tentang perubahan iklim sangat penting diadakan untuk generasi mendatang. Guru memahami pentingnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim namun kurang memiliki ide tentang cara mengintegrasikannya ke dalam proses mengajar dan belajar. Di samping itu, temuan tersebut menegaskan adanya celah antara aktivitas pembelajaran di sekolah dan pendidikan perubahan iklim. Para guru memandu siswa dalam program kebersihan sekolah, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk menghubungkan kegiatan tersebut dengan masalah-masalah perubahan iklim.

2.3.3. Kepala sekolah meningkatkan pengembangan kurikulum, kolaborasi lingkungan, pembelajaran yang berpusat pada anak, dan profesionalisme guru, namun mereka membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional tentang kompetensi kepemimpinan, praktik reflektif, dan integrasi pertemuan K3S.

Kepala sekolah telah mengarahkan pengembangan kurikulum, mendorong kolaborasi dengan organisasi-organisasi pendidikan lingkungan, memastikan pembelajaran yang berfokus pada anak, dan mengoptimalkan peran mereka sebagai pemimpin perubahan. Analisis ini juga sejalan dengan hasil Rapor Pendidikan 2024, di tingkat sekolah dasar, di mana kepemimpinan kepala sekolah mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan kepala sekolah yang mulai secara konsisten merujuk pada visi dan misi sekolah dan mengkomunikasikan visi serta misi tersebut kepada komunitas sekolah. Kepala sekolah telah mengimplementasikan program literasi, inisiatif konservasi, dan menggunakan Rapor Pendidikan untuk perencanaan. Mereka memprioritaskan profesionalisme guru melalui pelatihan, pengalokasian anggaran, dan penilaian kinerja. Mereka juga membentuk Komite Perlindungan dan Keselamatan Anak.

Analisis mengenai aspek kepemimpinan pendidikan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara menunjukkan beberapa area utama yang memerlukan peningkatan. Pertama, kompetensi kepemimpinan perlu ditingkatkan di antara para pemimpin pendidikan di daerah tersebut, seperti kemampuan para pemimpin untuk berkolaborasi dalam merancang program berdasarkan Rapor Pendidikan, serta kolaborasi untuk menyelaraskan program. Mungkin terdapat kekurangan dalam keterampilan dan kemampuan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan inisiatif pengembangan profesional.

Kedua, pengintegrasian praktik-praktik reflektif ke dalam pendekatan kepemimpinan diidentifikasi sebagai area yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam budaya kepemimpinan sekolah di kedua kabupaten tersebut. Tinjauan refleksi belum menjadi rujukan dalam pengembangan sekolah meskipun pertemuan K3S (kelompok kerja kepala sekolah) diadakan

¹⁴ Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang tidak hanya di Pulau Kalimantan tetapi juga di Indonesia dengan panjang 1.143 km. Terdapat berbagai jenis ikan endemik yang terancam punah seperti ikan Belida, dan ikan Hiu Bala di sungai ini.

secara rutin setiap bulan. Hal ini menunjukkan perlunya para pemimpin sekolah untuk melaksanakan praktik-praktik yang lebih reflektif guna meningkatkan proses pengambilan keputusan dan efektivitas kepemimpinan secara keseluruhan, di samping meningkatkan kualitas forum komunitas pembelajaran di mana para kepala sekolah berbagi pengalaman, tantangan, strategi, dan menciptakan ruang untuk pembelajaran kolaboratif. Forum semacam ini juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mendiskusikan konsep penilaian guru melalui Manajemen Talenta atau E-Kinerja, serta gagasan Sekolah yang Kita Cita-citakan.

Ketiga, terdapat seruan untuk adanya komitmen yang lebih kuat terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial (GEDSI) di antara para pemimpin sekolah di Ketapang dan Kayong Utara. Kebijakan penerimaan siswa umumnya menerima semua siswa tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi mereka. Namun, beberapa sekolah tidak memiliki program pelatihan tentang metode pengajaran inklusif untuk membantu guru mempersiapkan strategi pembelajaran bagi siswa-siswa dengan latar belakang yang beragam, terutama untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini menekankan pentingnya promosi kesetaraan gender dan inklusi sosial di lingkungan sekolah dan memastikan bahwa para pemimpin sekolah bekerja secara aktif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

Keempat, peraturan yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan di kedua kabupaten tersebut dianggap perlu diperkuat. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kesenjangan atau inkonsistensi dalam peraturan yang ada mengatur kepemimpinan sekolah, yang dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan secara keseluruhan di sekolah. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang terkait dengan kepemimpinan sekolah. Ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis saja tetapi juga pada aspek yang prinsipil, termasuk upaya pengembangan kompetensi kepala sekolah yang merujuk pada model kompetensi kepemimpinan sekolah.

2.3.4. Sekolah telah meningkatkan manajemen kekerasan melalui prakarsa- prakarsa seperti pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia dan Komite Perlindungan Anak, namun masih diperlukan peningkatan lebih lanjut.

Sekolah telah menunjukkan pemahaman mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanganan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Berbagai upaya seperti pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) anak telah dilakukan, serta kegiatan-kegiatan pendukung seperti rapat fakultas dan perbaikan regulasi sekolah. Laporan pendidikan tahun 2024 mengungkapkan bahwa sekolah menciptakan lingkungan yang aman yang memperbaiki kesejahteraan psikologis anak dan memiliki insiden perundungan serta hukuman fisik yang sangat rendah.

Analisis menunjukkan perlunya peningkatan dalam penegakan dan prosedur perlindungan anak, memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap anak, mengevaluasi kesalahpahaman terkait perlindungan badan pendidikan, serta memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan anak. Disarankan untuk melakukan upaya dalam memberikan bimbingan teknis, mengembangkan sistem manajemen kasus, mengevaluasi metode pengajaran, dan mengadvokasi komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan anak.

Temuan ini menyoroti pentingnya peningkatan penegakan hukum dan prosedur perlindungan anak untuk memastikan bahwa anak-anak benar-benar terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Ini mencakup meningkatkan mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut, serta memastikan bahwa tindakan hukum yang tepat diambil terhadap pelaku. Dengan meningkatkan penegakan kebijakan perlindungan anak, lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dapat tercipta dan kejadian kekerasan serta pelecehan dapat dihindari.

Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi perlunya penguatan mitigasi kasus kekerasan anak melalui langkah-langkah proaktif yang difokuskan pada pencegahan dan intervensi dini. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kampanye kesadaran, program pelatihan bagi guru dan pengasuh mengenai cara mengenali dan menangani tanda-tanda kekerasan, serta menyediakan layanan dukungan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan. Dengan memperkuat mitigasi kasus kekerasan anak, prevalensi kejadian-kejadian tersebut dapat dikurangi dan kesejahteraan anak-anak di masyarakat dapat terlindungi.

Temuan ini juga menekankan pentingnya mengevaluasi kesalahan-kesalahan konsepsi dalam pengajaran perlindungan diri untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh informasi yang tepat dan sesuai usia mengenai cara melindungi diri dari bahaya. Ini mencakup peninjauan materi-materi pendidikan yang ada seperti lagu-lagu yang digunakan untuk melatih pendidik tentang pengajaran perlindungan diri yang efektif.

Dengan mengatasi kesalahpahaman tentang pengajaran perlindungan diri, anak-anak dapat diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melindungi diri mereka sendiri serta mencari bantuan saat menghadapi ancaman terhadap keselamatan mereka.

Selain itu, temuan ini menekankan perlunya memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan anak dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup, menerapkan kebijakan yang komprehensif, serta memantau pelaksanaan dari inisiatif perlindungan anak. Ini mencakup pembentukan komite-komite dalam struktur pemerintah daerah untuk mengawasi usaha-usaha perlindungan anak, melakukan evaluasi rutin terhadap program perlindungan anak, serta melibatkan pemangku kepentingan untuk menggalang dukungan bagi inisiatif perlindungan anak. Dengan memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan anak, kerangka kerja yang berkelanjutan untuk melindungi hak anak-anak dapat dihasilkan.

2.3.5. Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlindungan anak, pendidikan karakter, dan inklusi sosial. Namun, diperlukan langkah-langkah yang konkret untuk mampu melaksanakan kebijakan secara efektif.

Pemerintah daerah Ketapang dan Kayong Utara telah menunjukkan langkah yang proaktif untuk meningkatkan sektor pendidikan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan anak, pendidikan karakter, dan inklusi sosial. Namun, pelaksanaan kebijakan secara efisien sangat penting untuk mengubah aspirasi tersebut menjadi hasil yang nyata. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, pemerintah daerah harus terkonsentrasi pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, dengan melibatkan

pemangku kepentingan, dan memprioritaskan pengembangan kapasitas para profesional pendidikan. Pendanaan yang cukup dan pengelolaan sumber daya yang transparan juga penting untuk efisiensi pelaksanaan. Kerjasama dan berbagi pengetahuan dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, insitusi akademik, dan mitra internasional, dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan inisiatif-inisiatif pendidikan mereka. Kesimpulannya, meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dan niat mereka untuk mengatasi isu pendidikan dan perlindungan anak, namun diperlukan tindakan konkret untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan mereka.

Rekomendasi untuk mengatasi tantangan-tantangan peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten Ketapang dan Kayong Utara:

Kurikulum dan Asesmen

1. Pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya untuk program pengembangan profesional untuk semua pemimpin pendidikan utama.
2. Memberikan bimbingan teknis tentang penilaian dan Kurikulum Merdeka, serta memanfaatkan narasumber dari pengawas sekolah, guru penggerak, BGP, BPMP atau praktisi pendidikan.
3. Mendorong sekolah untuk menjadikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, memetakan dan mengalokasikan guru, meningkatkan kapasitas mereka dalam mengajar Bahasa Inggris, dan menyediakan berbagai sumber daya pembelajaran untuk memudahkan pembelajaran.
4. Mengaktifkan kembali komunitas pembelajaran profesional sebagai wadah bagi guru dan pimpinan sekolah untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi secara mandiri.
5. Memperkuat kapasitas terkait pendidikan inklusif dan perubahan iklim serta berkolaborasi dengan LSM-LSM yang peduli dengan pendidikan inklusif dan isu-isu lingkungan.
6. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pegiat literasi untuk memperkuat ekosistem pendidikan.

Praktik Pengajaran

1. Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru untuk memanfaatkan aplikasi PMM atau PINTAR dalam kegiatan belajar mengajar. Ini termasuk membantu guru untuk memanfaatkan aplikasi "Awan Penggerak" di daerah-daerah terpencil, seperti kecamatan Simpang Hulu.
2. Membentuk komunitas pembelajaran profesional bagi guru untuk belajar tentang prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, membantu siswa berkebutuhan khusus dan memfasilitasi kolaborasi antara pakar pendidikan inklusif.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan LSM-LSM untuk meningkatkan mutu pendidikan, ini termasuk pengembangan materi pembelajaran baik untuk guru maupun siswa.

Kepemimpinan Pendidikan

1. Bappeda memimpin tinjauan refleksi atas program pendidikan dengan para pemangku kepentingan dan mengembangkan perencanaan bersama berbasis data yang sesuai dengan kondisi setempat.

2. Menyelenggarakan pengembangan profesional untuk para pemimpin pendidikan, terutama tentang Rapor Pendidikan.
3. Mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan pendidikan inklusif bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka terkait GEDSI.
4. Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan tentang kepemimpinan pendidikan dan melibatkan pemangku kepentingan dalam prosesnya.

Perlindungan Anak

1. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis tentang tugas TPPK untuk meningkatkan efektivitas penegakan perlindungan anak.
2. Mendorong kontribusi dari Bappeda untuk memastikan perihal perlindungan anak ada dalam dokumen-dokumen perencanaan lokal dan dukungan dari dinas pendidikan melalui dana BOS dan program sekolah.
3. Mengembangkan SOP untuk pengelolaan kasus yang didukung dengan kinerja TPPK yang optimal dan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya memahami hukum terkait pelecehan anak.
4. Menyediakan pengembangan profesional bagi guru dan pemangku kepentingan utama tentang perlindungan anak.
5. Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengadvokasi dan mendukung penerapan peraturan perlindungan anak yang komprehensif.

2.4. Nias Utara dan Nias Selatan

Nias Utara dan Nias Selatan adalah dua kabupaten yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias. Kabupaten Nias Utara memperoleh status resmi sebagai daerah otonom pada tahun 2008 sedangkan Kabupaten Nias Selatan menjadi daerah otonom sejak tahun 2003. Kedua kabupaten tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias Utara memiliki 20 taman kanak-kanak dan 166 sekolah dasar sedangkan Kabupaten Nias Selatan memiliki 86 taman kanak-kanak dan 356 sekolah dasar. Sementara itu, terdapat 1 RA dan 3 MI di Kabupaten Nias Utara. Kabupaten Nias Selatan memiliki 3 RA dan 4 MI. Terdapat 1 TK dan 2 sekolah dasar di Nias Utara dan 4 TK dan 19 SD di Nias Selatan yaitu berupa Sekolah Penggerak, yang berpotensi menyebarkan praktik-praktik efektif dalam meningkatkan keterampilan dasar.

Tabel 4. Pencapaian IPM dan pendidikan di Nias Utara dan Nias Selatan

Aspek	Nias Utara	Nias Selatan	Sumatra Utara
Populasi	155 873 orang	382 539 orang	15 386 640 orang
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023	64,64	64,12	73,37
Rata-rata tahun sekolah pada tahun 2023	6,85	6,48	9,82
Perkiraan tahun sekolah	13,36	12,78	13,48

pada tahun 2023			
Partisipasi murni sekolah dasar tahun 2023	95,40	94,24	97,95

Sumber: BPS, 2024

Data yang terdapat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pencapaian IPM dan pendidikan di kedua kabupaten tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah kedua kabupaten untuk memperbaiki layanan esensial mereka, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Nias Utara harus memperhatikan indikator literasi dan numerasi sebagai prioritas utama untuk pendidikan dasar. Di samping itu, layanan untuk penyandang disabilitas, fasilitas bagi siswa penyandang disabilitas dan dukungan untuk siswa-siswa berbakat—faktor-faktor yang mencerminkan inklusivitas—dianggap sebagai salah satu prioritas di samping kemampuan literasi dan numerasi. Perlu dicatat bahwa keamanan dan keragaman di sekolah menunjukkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan aspek inklusivitas sekolah. Sementara itu, dalam pendidikan anak usia dini, peningkatan proporsi pendidik yang memiliki ijazah minimal S1/D4, peningkatan Tingkat Partisipasi Sekolah untuk kelompok usia 5-6 tahun, serta fokus pada proporsi unit-unit PAUD terakreditasi Minimum B merupakan area penting yang membutuhkan perhatian dan perbaikan.

Temuan mengenai empat komponen dan peraturan di kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan adalah sebagai berikut:

2.4.1. Guru sedikit menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan anak, menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, dan mempromosikan kesetaraan dalam pembelajaran. Namun, terdapat kesalahan konsepsi yang terus-menerus tentang pembelajaran terdiferensiasi, dan tantangan dalam mengintegrasikan keterampilan literasi dan numerasi secara efektif.

Para pengajar menyesuaikan kurikulum dan penilaian dengan mengakomodasi prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan anak, pembelajaran yang terdiferensiasi, berbasis kesetaraan, dengan tetap berupaya menyediakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi anak. Meskipun kurikulum telah mencakup pendidikan karakter serta isu lingkungan dan perubahan iklim, pelaksanaannya masih terbatas. Para guru masih memiliki kesalahpahaman mengenai pembelajaran yang terdiferensiasi dan menggunakan gaya belajar sebagai satu-satunya acuan untuk variasi metode pengajaran mereka. Peningkatan pembelajaran melalui penyesuaian kurikulum juga terlihat dalam pencapaian Rapor Pendidikan.

Selanjutnya, para guru di Nias Selatan berkomitmen untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan menekankan pengembangan profesional dan strategi pengajaran yang inovatif. Integrasi teknologi, seperti platform Merdeka Mengajar dan Chromebook, semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempromosikan literasi digital. Selain itu,

pemerintah kabupaten telah berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan sumber daya pendidikan melalui partisipasi masyarakat. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti penguatan pendidikan inklusif untuk anak penyandang disabilitas, kualitas pembelajaran (termasuk metode mengajar, dukungan psikologis, dan manajemen kelas) serta penguatan pendidikan perubahan iklim di sekolah yang tercermin dengan adanya inisiatif seperti pemisahan limbah dan daur ulang.

Terdapat praktik baik di masyarakat Nias untuk meningkatkan kemampuan literasi warga. Misalnya, Lembaga Ya'ahowu dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lentera Ono Niha di Nias Selatan berinisiatif dengan menyediakan buku, mendirikan perpustakaan kecil di desa-desa. Selain itu, ada juga Universitas Nias Raya yang sedang mengembangkan pendidikan dan LPTK di pulau Nias. Potensi keterlibatan perguruan tinggi adalah dalam bidang pelayanan, penelitian dan Kampus Merdeka seperti siswa magang di sekolah-sekolah, program pengajaran kampus di tingkat TK dan SD untuk mendukung peningkatan literasi, numerasi, dan karakter siswa.¹⁵ Jadi, keterlibatan berbagai komunitas literasi dan perguruan tinggi sangat penting untuk mengembangkan ekosistem pendidikan.

Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan dan area untuk perbaikan dalam sistem pendidikan, khususnya terkait dengan praktik kurikulum dan penilaian. Salah satu temuan utama adalah minimnya pemahaman mengenai Kurikulum Merdeka di kalangan para pendidik dan pemangku kepentingan di daerah. Guru cenderung meyakini bahwa peningkatan keterampilan literasi dan numerasi terpisah dari proses pembelajaran sehari-hari. Program literasi seperti mobil perpustakaan keliling memiliki jenis buku yang terbatas dan armada yang terbatas. Kurangnya pemahaman mengenai kurikulum ini menghambat efektivitas pelaksanaannya dan membatasi potensi manfaatnya.

Selain itu, Nias Selatan menghadapi banyak tantangan dalam hal kurikulum dan asesmen untuk pendidikan anak usia dini, termasuk kendala pendanaan, kesulitan dalam komitmen dan pemantauan, serta pemilihan sumber daya yang sesuai. Masalah utama adalah kurangnya keterampilan para guru dalam penggunaan teknologi dan ketergantungan pada penilaian verbal yang sering kali mencerminkan minat siswa, bukannya ukuran standar. Implementasi kurikulum yang tidak konsisten menekankan perlunya bimbingan yang lebih baik, sementara kesenjangan dalam praktik penilaian menghambat pemantauan kemajuan siswa secara efektif. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan jumlah sekolah yang memiliki akreditasi minimum B, kualifikasi pendidikan guru, dan dukungan untuk penyandang disabilitas serta mereka yang berasal dari latar belakang terpinggirkan untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusi (Rapor Pendidikan, 2024).

Masalah penting lainnya yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah perlunya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi di sekolah-sekolah. Pembelajaran terdiferensiasi

¹⁵ Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan kegiatan di luar universitas selama 2 semester. Universitas diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswanya. Contoh jenis kegiatan program Kampus Merdeka yaitu: magang, kampus pendidikan, kuliah kerja nyata (KKN), proyek kemanusiaan, penelitian dan lain sebagainya.

adalah pendekatan yang mengenali dan mengakomodasi beragam kebutuhan serta preferensi belajar siswa. Dengan menyesuaikan pengajaran untuk masing-masing siswa, metode pembelajaran terdiferensiasi dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan hasil belajar siswa. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi saat ini di daerah-daerah tidak memadai, yang menyoroti pentingnya memperkuat aspek pengajaran dan pembelajaran ini.

Lebih lanjut, analisis menunjukkan lemahnya pendidikan tentang perubahan iklim di sekolah-sekolah di wilayah ini. Studi ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang perubahan iklim di daerah-daerah ini masih kurang, yang menekankan perlunya mengintegrasikan topik penting ini ke dalam kurikulum dan memberikan pelatihan serta sumber daya yang diperlukan kepada guru untuk dapat mengatasinya secara efektif.

Selain itu, analisis ini mengungkapkan kesalahpahaman tentang pemanfaatan PMM; miskonsepsi bahwa mereka harus menggunakan komputer yang menyebabkan guru tidak menggunakan PMM untuk merancang dan mengimplementasikan pelajaran. Kesalahpahaman dan salah pengertian mengenai penggunaan PMM tersebut menunjukkan perlunya klarifikasi dan bimbingan tentang bagaimana memanfaatkan alat penilaian ini secara efektif untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan siswa.

Temuan-temuan mengenai pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat dasar menunjukkan adanya praktik-praktik yang positif. Beberapa sekolah dasar negeri telah mulai mengajarkan Bahasa Inggris sebagai muatan lokal sejak tahun ajaran 2022. Para guru yang berperan adalah guru honorer dengan latar belakang pendidikan Bahasa Inggris yang direkrut oleh lembaga pendidikan. Pembelajaran Bahasa Inggris telah diterapkan untuk siswa-siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah tantangan budaya lokal. Sebagian besar siswa masih menggunakan bahasa daerah Nias, sehingga menyulitkan guru dalam mengenalkan abjad dan dialek Bahasa Inggris. Untuk mengatasi tantangan ini, guru berusaha menyesuaikan kemampuan siswa dengan memperkenalkan Bahasa Inggris sejak tingkat dasar. Strategi ini dianggap efektif dalam mengatasi tantangan tersebut, karena beberapa siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan demikian, diperlukan dukungan kebijakan dan sistem untuk memenuhi kebutuhan guru dan dukungan bahan ajar sehingga hambatan dapat diatasi untuk mencapai target transisi ke Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar mulai tahun ajaran 2027.

Selain itu, analisis tersebut menyoroti perbedaan antara peraturan dan aplikasinya dalam sistem pendidikan. Meskipun terdapat kebijakan dan pedoman yang ditetapkan yang mengatur tentang kurikulum dan praktik penilaian, penelitian ini mengidentifikasi adanya kurangnya keselarasan antara peraturan tersebut dan implementasi aktualnya di sekolah. Ketidaksesuaian ini dapat memunculkan kebingungan, inkonsistensi, dan inefisiensi dalam sistem pendidikan, yang menegaskan pentingnya memastikan koherensi dan konsistensi antara arahan kebijakan dan praktik di lapangan.

2.4.2. Para Guru telah berlatih untuk meningkatkan kecakapan literasi, numerasi, dan karakter, tetapi mereka menghadapi tantangan dalam memprioritaskan keterampilan ini dan menerapkan Kurikulum Merdeka

Terdapat berbagai praktik pengajaran yang baik yang telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter mulai dari kegiatan bercerita, mendampingi anak penyandang disabilitas, hingga menyiapkan buku-buku penunjang. Pembelajaran telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak, terutama dalam mendorong partisipasi aktif dan keterampilan motorik anak, sekaligus memastikan kesetaraan gender. Seperti temuan sebelumnya, hasil ini juga digambarkan dalam laporan pendidikan yang menunjukkan adanya dukungan yang kondusif dan afektif serta aktivasi kognitif dari para guru.

Para guru di kabupaten Nias Selatan menunjukkan komitmen yang baik untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka melalui pengembangan profesional dengan berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan kegiatan pengembangan profesional yang disediakan oleh PMM dan program yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kemenag. Pendekatan inovatif diterapkan melalui penggunaan metode pengajaran yang berfokus pada siswa yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Para guru terlibat aktif dalam komunitas pembelajaran profesional, yang menjalin kerjasama untuk meningkatkan lingkungan belajar secara keseluruhan melalui KKG. Temuan ini konsisten dengan pencapaian refleksi dan peningkatan pembelajaran guru, yang menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh laporan pendidikan. Pendidikan tentang perubahan iklim dikenalkan melalui kegiatan penerapan kebiasaan kepada siswa mengenai kebersihan, dan membiasakan membawa botol minum serta memilah sampah (daur ulang). Selain itu, ada sekolah yang menanam bunga *Sansevieria* di lingkungan sekolah untuk menyerap karbon dioksida.

Guru memiliki peranan kunci sehingga pengembangan profesional untuk mereka dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan kurikulum. Untuk memastikan mutu, evaluasi kinerja dilaksanakan melalui pengawasan berkala. Namun, dinas pendidikan kabupaten Nias Utara menghadapi keterbatasan anggaran yang menghambat proses pengawasan guru.

Penelitian ini menggarisbawahi beberapa tantangan utama dalam aspek pengajaran. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah bahwa tingkat literasi dan numerasi siswa belum menjadi fokus utama sistem pendidikan. Kurangnya penekanan pada keterampilan dasar ini dapat menghalangi perkembangan akademis siswa secara keseluruhan dan peluang di masa depan. Selain itu, para guru menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka, yang menunjukkan perlunya pelatihan dan dukungan yang lebih menyeluruh di bidang ini. Sebagian besar sekolah baru mulai menerapkan Kurikulum Merdeka seperti yang terjadi di Nias Utara dengan hanya 1 PAUD dan 2 SD yang terlibat dalam program Sekolah Penggerak. Sementara di kabupaten Nias Selatan terdapat 4 PAUD dan 19 SD yang telah menjadi Sekolah Penggerak.¹⁶

Tantangan penting lainnya adalah kurangnya keterampilan manajemen kelas yang efektif di antara para guru. Manajemen kelas sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung dan memaksimalkan keterlibatan serta pencapaian siswa. Tanpa pelatihan dan dukungan yang tepat dalam bidang ini, para guru mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan disiplin yang positif dan memfasilitasi pengalaman belajar yang efektif bagi

¹⁶ Data Sekolah Penggerak diakses dari <https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/implementasi-psp>

siswa mereka. Selain itu, tantangan di Nias Selatan dalam praktik mengajar terutama berasal dari pengembangan profesional yang tidak memadai dan keterbatasan sumber daya. Banyak guru tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif serta menerapkan metode pengajaran yang inovatif. Selain itu, terdapat masalah terkait dengan kurangnya akses ke teknologi, konektivitas internet yang buruk, dan minimnya dukungan untuk guru di daerah pedesaan. Faktor-faktor ini menghambat pelaksanaan program pelatihan dan praktik inovatif yang efektif dalam pendidikan, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis terhadap pengembangan profesional guru dan pengembangan kapasitas. Hasil Rapor Pendidikan 2024 juga menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran oleh guru perlu ditingkatkan. Salah satu faktor adalah guru belum secara konsisten mengelola kelas mereka untuk bisa pengalaman belajar yang mendukung, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran untuk siswa.

Lebih lanjut, guru menghadapi tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan aplikasi PMM. Banyak guru yang belum mengakses PMM karena ragu dan belum menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi serta mengembangkan satu lembar kerja untuk semua siswa, dan belum mengakomodasi siswa-siswa dengan kebutuhan khusus. Meningkatkan literasi digital guru dan menyediakan dukungan berkelanjutan dalam penggunaan teknologi pendidikan dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Penelitian ini juga menekankan kurangnya dukungan untuk meningkatkan kapasitas guru. Kesempatan untuk pengembangan profesional sangat krusial bagi guru agar dapat tetap mengikuti praktik terbaik dalam pendidikan, meningkatkan keterampilan mengajar mereka, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Tanpa dukungan yang cukup untuk pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan, guru mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan sistem pendidikan yang terus berubah. Oleh karena itu penting untuk mengaktifkan KKG untuk menyelenggarakan pelatihan.

Kesetaraan gender dan pendidikan inklusif diidentifikasi sebagai area yang perlu perhatian di daerah-daerah ini. Pemahaman guru tentang keanekaragaman dan inklusivitas masih terbatas. Lokasi geografis, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, kekurangan personel terlatih, dan keterbatasan anggaran adalah faktor penghambat dalam pemahaman dan pelaksanaan program GEDSI. Memastikan akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua siswa, terlepas dari jenis kelamin atau kemampuan, sangat penting untuk mendorong penciptaan keadilan sosial dan pembangunan inklusif. Dengan mengatasi hambatan dalam pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, sekolah dapat lebih baik mendukung berbagai kebutuhan siswa dan membangun masyarakat yang inklusif.

Pendidikan tentang perubahan iklim adalah satu aspek yang belum terintegrasi dalam kurikulum sekolah di wilayah tersebut padahal pendidikan mengenai aspek ini sangat diperlukan di Kepulauan Nias. Pulau Nias berada di Samudera Hindia dan memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah seperti berbagai jenis ikan, babi, kambing, burung nuri serta pohon karet, kelapa, cengkeh, dan nilam. Selain itu, konektivitas antar wilayah dilakukan melalui jalur penerbangan dan jalur laut yang kondisinya dipengaruhi oleh cuaca. Salah satu dampak perubahan iklim selain ancaman terhadap ekosistem adalah cuaca ekstrem yang mengganggu penerbangan dan pelayaran. Dengan demikian, perubahan iklim penting untuk diintegrasikan dalam kurikulum.

Terdapat anggapan yang salah bahwa pendidikan tentang perubahan iklim identik dengan program kebersihan. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pendidikan perubahan iklim di sekolah. Berdasarkan pengamatan di sekolah, tampaknya diperlukan program mitigasi bencana. Diperlukan pendampingan dan pelatihan guru tentang pendidikan perubahan iklim. Pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran yang cukup dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pendidikan perubahan iklim.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan untuk pengembangan kapasitas guru tidak spesifik di daerah-daerah ini. Kebijakan yang jelas dan tepat sasaran sangat penting untuk mengarahkan reformasi pendidikan dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif. Dengan memberikan dukungan kebijakan yang lebih spesifik untuk pelatihan guru, pengembangan profesional, dan inisiatif pengembangan kapasitas lainnya, para pembuat kebijakan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan di Nias Utara.

2.4.3. Praktik-praktik pemimpin sekolah meningkatkan pengembangan karakter dan lingkungan belajar siswa. Namun, terdapat tantangan-tantangan seperti kurangnya kolaborasi, keterbatasan pemahaman tentang pendidikan inklusif, kesetaraan gender, dan perubahan iklim.

Dalam kepemimpinan pendidikan, saat ini terdapat sejumlah praktik baik yang diterapkan. Praktik-praktik baik tersebut berfokus pada dukungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan karakter siswa dan menyediakan lingkungan belajar yang aman. Kepala sekolah menilai bahwa sekolah memiliki strategi visi dan misi yang terencana dengan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat sejumlah dampak positif yang dirasakan, mulai dari peningkatan hasil belajar siswa, rasa kerinduan siswa untuk belajar, peningkatan kolaborasi, hingga keterlibatan aktif orang tua. Praktik-praktik terbaik kepala sekolah tersebut sejalan dengan Rapor Pendidikan di mana kepemimpinan sekolah mempunyai komunikasi, sistem, dan program yang cukup.

Kepemimpinan pendidikan yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan siswa dan pengembangan guru. Kekuatan-kekuatan yang ditemukan di Nias Selatan, seperti adanya guru penggerak dan dedikasi kepala sekolah untuk pengembangan diri, merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan menekankan pengambilan keputusan berdasarkan data, prioritas pengembangan profesional kepala sekolah, serta visi yang jelas mengenai inklusivitas, para pemimpin sekolah dapat menyelaraskan praktik-praktik mereka dengan tujuan pemerintahan untuk mewujudkan pendidikan berbasis bukti. Penyelarasan ini tidak hanya memperbaiki kompetensi kepala sekolah tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung bagi siswa. Pada akhirnya, kepemimpinan pendidikan yang kuat sangat penting untuk mendorong perbaikan sistemik dan memastikan bahwa seluruh siswa memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas baik. Temuan ini sejalan dengan hasil Rapor Pendidikan tahun 2024, yang menunjukkan pencapaian baik dan peningkatan dari tahun sebelumnya dalam aspek kepemimpinan instruksional.

Namun, pengamatan terhadap aspek kepemimpinan pendidikan mengungkapkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut mencakup kurangnya kolaborasi dari kepala sekolah, pemahaman yang belum memadai tentang pendidikan inklusif, kesetaraan gender, dan perubahan iklim, serta perlunya penguatan kepemimpinan instruksional. Selain itu, terdapat kekurangan kebijakan khusus untuk pengembangan kapasitas kepala sekolah di daerah tersebut. Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah di area tersebut, penting untuk memberikan pelatihan, sosialisasi, dan kebijakan yang mendukung.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pimpinan sekolah menghadapi banyak kendala dalam mengelola sekolah secara efektif. Kepemimpinan sekolah menghadapi tantangan seperti kurangnya kolaborasi. Minimnya pengetahuan tentang Kurikulum Merdeka, loyalitas guru, hubungan yang tidak baik antara kepala sekolah dengan komite dan orang tua, serta kurangnya dukungan dan pengawasan dari dinas pendidikan menjadi hambatan dalam mengoptimalkan kinerja kepemimpinan sekolah.

Di Nias Selatan, kepemimpinan pendidikan juga menemui tantangan-tantangan signifikan yang menghalangi peningkatan sekolah yang efektif. Tantangan tersebut termasuk keterbatasan sumber daya, seperti masalah anggaran dan kurangnya tenaga kerja yang berkualitas, serta perlunya perubahan paradigma kepemimpinan di antara para pemimpin sekolah. Selain itu, adanya pergantian kepemimpinan yang sering dan minimnya ketrampilan teknologi di antara beberapa pemimpin semakin memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi tantangan ini, peningkatan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dan pemberian panduan yang terarah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang penting sangat diperlukan, terutama dalam manajemen perubahan dan kepemimpinan instruksional.

Tantangan penting lainnya yang disorot dalam analisis ini adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep-konsep pendidikan utama seperti pendidikan inklusif, kesetaraan gender, dan perubahan iklim. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kepala sekolah perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang praktik-praktik inklusif untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi setiap siswa. Demikian pula, mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa siswa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara terhadap kesempatan pendidikan. Selain itu, menangani dampak perubahan iklim terhadap pendidikan sangat penting dilakukan untuk mengembangkan sistem sekolah yang berkelanjutan dan tangguh.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan instruksional kepala sekolah masih perlu diperkuat. Beberapa kepala sekolah masih menghadapi kesulitan dalam mengatur jadwal rapat, memimpin guru, dan memantau program untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kepala sekolah juga belum memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pelatihan kepemimpinan instruksional, kurangnya kerja sama yang baik antara guru dan kepala sekolah, serta arogansi dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kepala sekolah untuk mewujudkan kepemimpinan instruksional yang efektif sangat penting dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di wilayah tersebut.

Selain itu, analisis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan khusus untuk pengembangan kapasitas kepala sekolah di Nias Utara. Kebijakan dan pedoman yang jelas untuk pengembangan profesional pemimpin sekolah sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam praktik kepemimpinan. Kebijakan ini dapat menguraikan harapan-harapan untuk kepala sekolah, memberikan panduan tentang kompetensi kepemimpinan, dan menawarkan kesempatan untuk pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan. Penetapan kebijakan khusus untuk pengembangan kepala sekolah dapat membantu menciptakan pendekatan yang lebih terstruktur dan efektif untuk pengembangan kepemimpinan di wilayah tersebut.

2.4.4. Strategi penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan dukungan undang-undang dan peraturan perlindungan anak, serta pelatihan bagi guru dan siswa. Namun, kesadaran dan prioritas terhadap isu perlindungan anak masih kurang, sehingga berpotensi merugikan anak, sehingga perlu adanya kebijakan dan peraturan yang lebih kuat.

Praktik-praktik terbaik dalam perlindungan anak di Nias Selatan ditandai dengan penerapan program kabupaten ramah anak¹⁷, pembentukan komite perlindungan anak, dan kolaborasi dengan tokoh agama, yang mendorong keterlibatan masyarakat. Selain itu, prakarsa-prakarsa yang menargetkan gizi anak, kemitraan dengan LSM, kerja sama kepolisian, dan dukungan dari layanan sosial berkontribusi terhadap penerapan pendekatan yang menyeluruh terhadap kesejahteraan anak. Upaya bersama ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk melindungi anak di antara pendidik dan anggota masyarakat, yang menyoroti pentingnya kerjasama di antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan pencapaian Rapor Pendidikan 2024 pada aspek iklim pembelajaran yang aman dan memadai. Lingkungan sekolah sudah terjamin keamanannya sebagaimana dibuktikan oleh kesejahteraan psikologis dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, serta kekerasan seksual.

Selain itu, strategi regulasi penanganan kasus kekerasan seksual, serta aktivasi diskusi mengenai penanganan kasus kekerasan seksual telah diterapkan dan perlu didukung oleh undang-undang tentang perlindungan anak serta aturan-aturan yang memperkuat sekolah dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak dan perlunya pelatihan/sosialisasi bagi guru dan siswa mengenai pencegahan kekerasan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kurangnya kesadaran dan prioritas terhadap isu perlindungan anak. Para pemangku kepentingan menyadari pentingnya keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), tetapi tidak memahami secara jelas posisi TPPK, yang sebenarnya berada di tingkat sekolah, bukan di tingkat kabupaten. Kurangnya pemahaman ini dapat memberi dampak negatif pada kesejahteraan dan keselamatan anak-anak di wilayah tersebut. Tanpa penekanan yang kuat pada kebijakan dan regulasi perlindungan anak, terdapat risiko bahwa anak-anak dapat terpapar pada berbagai bentuk bahaya.

¹⁷ Kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang direncanakan secara matang dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Contoh program ramah anak adalah tersedianya ruang publik dan taman bermain anak di kantor dan tempat umum, orang tua dapat mengolah jati diri anak tanpa hambatan.

Salah satu isu utama yang disorot dalam analisis ini adalah keberadaan lingkungan kelas yang tidak aman bagi siswa. Sifat sekolah yang tidak aman membuat anak-anak berisiko digigit anjing penyebab rabies karena sekolah tidak memiliki pagar.¹⁸ Selain itu, minimnya fasilitas toilet yang aman menjadikannya tempat yang rentan terhadap tindakan kekerasan. Hal ini menjadi perhatian penting karena sekolah seharusnya menjadi lokasi yang aman dan terlindungi bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Keberadaan lingkungan kelas yang tidak aman tidak hanya meningkatkan risiko anak-anak mengalami kekerasan fisik, tetapi juga menghambat kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dan berprestasi secara akademis. Penanganan isu ini harus menjadi prioritas utama bagi para pembuat kebijakan dan otoritas pendidikan di daerah ini.

Selain itu, perlindungan anak di Nias Selatan saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk pendanaan yang tidak mencukupi, dan simulasi kesiapsiagaan bencana yang tidak memadai. Ada kebutuhan mendesak akan pendekatan sistematis terhadap perlindungan anak di sekolah, karena upaya-upaya yang ada seringkali terpisah dan tidak konsisten. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan masalah koordinasi di antara berbagai tingkat pemerintahan semakin menyulitkan pelaksanaan dan penyediaan layanan yang efektif.

Lebih jauh, belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur perlindungan anak dan kota ramah anak adalah hal penting yang perlu diatasi. Peraturan daerah memiliki peranan krusial dalam memastikan bahwa tindakan perlindungan anak diimplementasikan dengan baik di tingkat dasar. Tanpa adanya pedoman dan regulasi yang tegas, ada kemungkinan terjadinya inkonsistensi dan kurangnya perlindungan hak-hak anak di daerah tersebut.

2.4.5. Pemerintah kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan berkomitmen terhadap pendidikan dan perlindungan anak, tetapi tidak memiliki peraturan khusus tentang perlindungan anak

Pemerintah kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan telah berusaha menunjukkan komitmen mereka terhadap pendidikan dan perlindungan anak. Namun, kedua daerah ini belum memiliki peraturan tentang perlindungan anak. Bidang pendidikan diatur dalam kebijakan rencana pembangunan daerah (RPJMD), serta peraturan lainnya. Sebagai contoh, Nias Utara memiliki peraturan daerah No. 14 Tahun 2013 mengenai penyelenggaraan pendidikan, tetapi peraturan ini perlu ditinjau ulang untuk tetap relevan dengan perkembangan kebijakan saat ini. Dukungan regulasi diperlukan agar pemerintah daerah ini memiliki landasan dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Rekomendasi untuk mengatasi tantangan-tantangan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan:

Kurikulum dan Asesmen

1. Menyediakan sarana pengembangan profesional untuk para pemangku kepentingan pendidikan untuk memahami konsep Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Ini

¹⁸ Lihat <https://medan.tribunnews.com/2024/05/23/2-pelajar-di-nias-selatan-luka-luka-diserang-anjing-peliharaan-warga-yang-bebas-berkelian>

termasuk pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk perencanaan program dan pemantauan pelaksanaan.

2. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah, termasuk mendukung guru di daerah-daerah terpencil untuk menggunakan aplikasi “Awan Penggerak”.
3. Banyak anak-anak di Nias masih menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu mereka, oleh karena itu bahasa Inggris idealnya diajarkan di tahun ke-3 atau fase B, karena pada usia tersebut anak-anak biasanya sudah memiliki dasar yang cukup dalam bahasa ibu mereka dan mulai siap untuk belajar bahasa asing.
4. Menyediakan sarana pengembangan profesional untuk para pemangku kepentingan utama tentang cara yang efektif untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, pendidikan inklusif dan pendidikan perubahan iklim.
5. Mendukung pemerintah dan dewan legislatif daerah untuk mengembangkan peraturan tentang pelaksanaan pendidikan.
6. Menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pegiat literasi dan universitas untuk mengembangkan ekosistem pendidikan yang meningkatkan keterampilan dasar siswa. Kerja sama dapat dilaksanakan melalui pengabdian masyarakat, penelitian, dan program Kampus Merdeka.

Praktik Pembelajaran

1. Menyediakan pelatihan profesional guru untuk memahami konsep Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka, termasuk penerapan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi, cara penggunaan PMM, dan pengintegrasian kesetaraan gender dan pendidikan inklusif.
2. Mendorong para guru untuk menggunakan platform “Awan Penggerak” khususnya bagi guru-guru yang memiliki kendala dalam mengakses internet dan melakukan pengawasan, dan pendampingan dari pengawas dan kepala sekolah untuk memanfaatkan PMM.
3. Memperkuat pengembangan profesional guru melalui komunitas belajar, PMM, KKG dan program-program terkait lainnya, termasuk memberikan pelatihan kepada guru tentang pendidikan inklusif dan perspektif kesetaraan gender.
4. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja guru secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pengajaran.
5. Mengembangkan materi pembelajaran tentang perubahan iklim yang sesuai dengan jenjang pendidikan, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pendidikan perubahan iklim.

Kepemimpinan Pendidikan

1. Bappeda memimpin tinjauan refleksi atas program pendidikan dengan para pemangku kepentingan dan menyusun perencanaan bersama berbasis data yang sesuai dengan kondisi setempat.
2. Menyediakan sarana pengembangan profesional untuk kepala sekolah dan pemerintah dalam hal berbagai aspek kepemimpinan, termasuk pendidikan inklusif dan kesetaraan gender.

3. Memperkuat mekanisme pemilihan dan penempatan kepala sekolah serta mengembangkan metode yang lebih efektif untuk mengevaluasi penilaian kepala sekolah dan guru.
4. Membangun budaya berkolaborasi dan komunikasi yang terbuka antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua.
5. Menyediakan prasarana dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta membangun jaringan atau mitra sekolah untuk menangani dan melayani anak berkebutuhan khusus.
6. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai organisasi berbasis masyarakat terkait yang peduli terhadap pendidikan perubahan iklim, GEDSI, dan pendidikan secara umum.

Perlindungan Anak

1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak kepada seluruh pemangku kepentingan dan menyusun SOP penanganan kasus yang didukung oleh kinerja TPPK yang optimal.
2. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, LSM, dan komite tentang perlindungan anak serta menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan pembentukan TPPK.

3. Kesimpulan & Rekomendasi

3.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan adanya potensi dan tantangan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang dihadapi para pendidik di delapan kabupaten di Indonesia, yaitu Tanggamus, Pesisir Barat, Halmahera Utara, Kepulauan Morotai, Ketapang, Kayong Utara, Nias Utara, dan Nias Selatan. Para pendidik ini telah menunjukkan beberapa inisiatif dan praktik yang baik di bidang kurikulum dan penilaian, praktik mengajar, kepemimpinan sekolah, dan perlindungan anak.

Sekolah dan pembuat kebijakan di tingkat kabupaten telah menunjukkan usaha untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar. Beberapa sekolah berjuang keras untuk mengembangkan kurikulum inklusif berbasis sekolah, membentuk komunitas belajar guru, dan memanfaatkan data rapor sekolah untuk peningkatan mutu. Beberapa guru juga menunjukkan ketertarikan untuk terlibat dalam komunitas belajar profesional dan memperbaiki praktik mengajar mereka dengan mengakses berbagai sumber daya pembelajaran meskipun menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kabupaten berupaya menjamin bahwa transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar berjalan lancar dan mendorong siswa untuk menikmati pembelajaran mereka. Kabupaten-kabupaten tertentu mendukung dan menyetujui pendekatan GEDSI, yang sejalan dengan data rapor. Selain itu, guru bersedia mengeksplorasi strategi-strategi yang ada untuk meningkatkan kecakapan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Praktik-praktik ini meliputi penilaian diagnostik, manajemen kelas, dan penerapan metode pengajaran yang inovatif dan berfokus pada siswa. Praktik-praktik ini juga mulai mengintegrasikan kesadaran lingkungan ke dalam mata pelajaran, yang mendorong perubahan perilaku untuk adaptasi iklim. Penelitian ini juga menemukan praktik-praktik yang baik dalam kepemimpinan sekolah, termasuk keterlibatan aktif pendidik dalam proses pengembangan kurikulum, dengan mempertimbangkan elemen-elemen pendidikan inklusif dan perubahan iklim, yang menekankan pada pengembangan profesional guru, memastikan keselamatan fisik dan psikologis siswa, serta menjamin akses yang sama terhadap kesempatan belajar untuk semua siswa. Para pembuat kebijakan utama di tingkat kabupaten juga telah menetapkan peraturan yang secara spesifik menangani kekerasan terhadap anak, membentuk kelompok kerja untuk memantau dan menangani isu perlindungan anak, yang menunjukkan komitmen mereka untuk menyediakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan-tantangan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di delapan kabupaten tersebut. Terbatasnya penggunaan sumber daya pembelajaran yang beragam dalam praktik pengajaran dan aplikasi PMM atau PINTAR dapat menjelaskan dampak kurang optimalnya proses pembelajaran terhadap keterampilan literasi dan numerasi siswa. Pemahaman tentang Kurikulum Merdeka dan P5 masih perlu ditingkatkan. Hal ini menekankan perlunya peningkatan pemanfaatan Rapor Pendidikan, PMM, PINTAR, SIBI, dan program-program webinar untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif dan berdampak bagi siswa. Terdapat pula kurangnya kerjasama antara guru atau kelompok kerja guru (KKG), yang menjadi penghalang dalam pertukaran gagasan dan sumber belajar di antara guru. Kondisi geografis merupakan tantangan tersendiri untuk mengakses

sumber pembelajaran dan berkontribusi pada kurangnya perhatian guru terhadap literasi dalam membangun budaya baca di sekolah.

Kepemimpinan pendidikan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengawasan guru yang tidak merata, kualifikasi kepala sekolah yang tidak memadai, dan integrasi yang kurang optimal antara pendidikan perubahan iklim dan GEDSI. Meningkatkan kapasitas dan budaya yang inklusif sangat diperlukan. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan Rapor Pendidikan di sekolah tidak optimal, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan hasil pendidikan. Beberapa kepala sekolah telah menggunakan data rapor untuk merancang rencana strategis dan meningkatkan kualitas sekolah, tetapi banyak yang belum melakukannya, karena terbatasnya pemahaman mereka tentang Rapor Pendidikan.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang memenuhi kebutuhan khusus siswa dan pendidikan tentang perubahan iklim belum terintegrasi dengan baik. Pendidikan perubahan iklim telah diperkenalkan melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tetapi belum sepenuhnya tertanam dalam kurikulum sekolah, modul pengajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat pula tantangan dalam mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial di lingkungan sekolah.

Kebijakan perlindungan anak kurang dipahami dan diterapkan, sehingga mengakibatkan stigma sosial dan mekanisme pencegahan yang tidak jelas. Peraturan daerah diperlukan untuk memperbaiki situasi ini, sementara keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan yang efektif. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di sekolah, pemerintah daerah harus meningkatkan dukungan melalui regulasi pendidikan dan perlindungan anak. Menghadapi tantangan-tantangan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa upaya perlindungan anak menjadi efektif.

Lebih jauh, pelajaran yang dapat diambil dari delapan kabupaten tersebut adalah: pertama, komitmen berbagai kabupaten untuk meningkatkan mutu pendidikan terlihat jelas dalam peraturan dan kebijakan yang mereka terbitkan. Misalnya, kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur pelaksanaan kebijakan pendidikan, kualifikasi guru, pengembangan kurikulum, perlindungan anak, dan pendidikan inklusif. Namun, dalam hal pengembangan kapasitas guru, pemerintah kabupaten perlu menetapkan kerangka kerja dan peraturan untuk memastikan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Kedua, di beberapa kabupaten, terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak efektif dalam menangani isu-isu pendidikan utama seperti pengembangan profesional berkelanjutan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dalam mengidentifikasi masalah inti dan memanfaatkan sistem Rapor Pendidikan untuk mengembangkan rencana dan program pendidikan. Bidang-bidang khusus yang perlu menjadi perhatian meliputi keterlibatan orang tua untuk meningkatkan pembelajaran anak, memastikan akses yang adil terhadap pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan, serta mengembangkan kebijakan afirmatif untuk siswa-siswa dari kelompok rentan demi meningkatkan partisipasi pendidikan.

3.2. Rekomendasi

Rekomendasi untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perlindungan anak di delapan kabupaten tersebut:

Kurikulum dan Asesmen

Terdapat beberapa saran untuk pelaksanaan kurikulum dan metode penilaian siswa di sekolah. Di antaranya adalah peningkatan sistem dukungan bagi sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, termasuk pengintegrasian GEDSI dan perubahan iklim serta dukungan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar karena hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan literasi yang diperlukan anak-anak dalam konteks globalisasi. Alokasi materi pembelajaran dan dukungan penggunaan platform Awan Penggerak di daerah 3T, serta pengaktifan Komunitas Belajar, KKG, dan KKKS, serta penyediaan peraturan dan pedoman. Di samping itu, penting untuk membangun kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pelaku literasi dan perguruan tinggi untuk mengembangkan ekosistem pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan dasar siswa. Keterlibatan perguruan tinggi melalui program Kampus Merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, untuk LPTK melalui prajabatan guru dan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah. Saran ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi siswa, mendorong adaptasi terhadap perubahan iklim, dan meningkatkan mutu pendidikan.

Praktik Pengajaran

Rekomendasi untuk bidang ini meliputi penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi guru, pengembangan profesi melalui aplikasi PMM atau PINTAR, peningkatan pelatihan pendidikan inklusif, peningkatan profesionalisme guru melalui KKG, dan program-program lain yang berhubungan, pendampingan guru dalam menggunakan platform “Awan Penggerak” serta sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengajaran mereka, dan pengembangan materi ajar dan pembelajaran yang bersifat lokal. Selain itu, peningkatan literasi dan literasi sekolah, pengembangan kolaborasi antara guru, hubungan guru dengan siswa, dan interaksi guru dan orang tua, evaluasi serta pengajaran kinerja guru, serta kerjasama dengan LSM untuk mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam kurikulum dan kegiatan pengajaran. Praktik-praktik ini bertujuan untuk memperbaiki pendidikan inklusif, perspektif gender, dan pembelajaran yang terdiferensiasi, mempertinggi literasi digital, dan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang mendukung. Praktik-praktik ini sangat penting untuk dilaksanakan agar dapat mendorong pendidikan inklusif dan memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam.

Kepemimpinan Pendidikan

Rekomendasi untuk kepemimpinan pendidikan mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pemanfaatan data, mendorong peran Bappeda untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan pendidikan berbasis data, melibatkan komunitas sekolah dalam perencanaan peningkatan kinerja, melakukan pengawasan terhadap guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, berkolaborasi dengan komunitas sekolah dan organisasi berbasis masyarakat setempat, mendorong inklusi gender dan keberagaman gender, serta memberikan pelatihan mengenai pendidikan perubahan iklim. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mendorong budaya kerja sama antara sekolah, guru, dan anggota masyarakat.

Perlindungan Anak

Rekomendasi untuk perlindungan anak mencakup penerapan peraturan sosial serta mekanisme perlindungan anak melalui TPPK, peningkatan dukungan masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi, advokasi pemerintah daerah dalam mengatur perlindungan dan hak anak, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas, pembinaan koordinasi serta komunikasi antara orang tua, guru, dan staf sekolah, peningkatan integrasi sekolah, serta pemanfaatan teknologi demi terciptanya komunikasi dan edukasi yang efektif mengenai perlindungan anak..

~ Selesai ~

Referensi

Aditomo, Nino. (2024). *Laying the Foundations of Systemic Change in Education: Reflections on Indonesia's Merdeka Belajar Reform*. Kemdikbud. The paper can be accessed through: https://pskp.kemdikbud.go.id/file/kebijakan/1719449376_file.pdf

Stratton-Berkessel, R. (2010). *Appreciative inquiry for collaborative solutions: 21 strength-based workshops*. John Wiley & Sons.

Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design*. Ascd.

World Bank. (2020). *Janji Pendidikan di Indonesia*. The paper can be accessed through: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/655541605538809213/pdf/Executive-Summary.pdf>

Policy papers

Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Peraturan Mendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Mendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada RA dan Madrasah

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Agama lingkup Kementerian Agama

Lampiran



Lokakarya Pertama di Nias Utara,
15 Maret 2024



Kunjungan sekolah di Nias Utara



Diskusi kelompok di Nias Utara



Lokakarya kedua di Nias Utara, 1 Juli 2024



Lokakarya pertama di Ketapang, 25 Maret
2024



Diskusi kelompok & presentasi di Ketapang



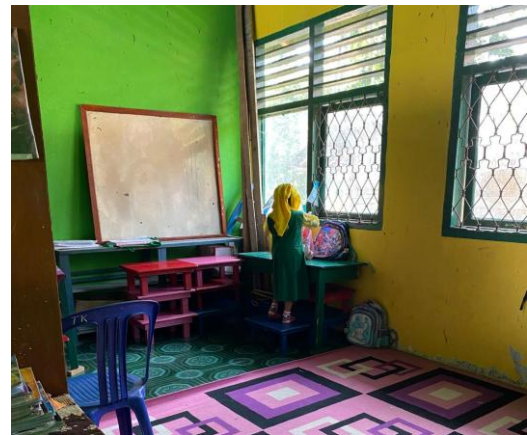
Observasi sekolah di Ketapang



Lokakarya kedua di Ketapang,
20 Juni 2024



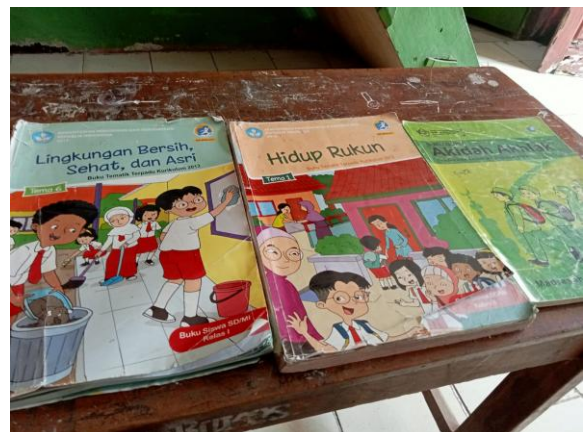
Lokakarya pertama di Tanggamus, 27 Mei
2024



Kunjungan sekolah di Tanggamus



Lokakarya kedua di Tanggamus,
30 Juni 2024



Meskipun telah menerapkan Kurikulum Merdeka, para guru masih menggunakan buku Kurikulum 2013 sebagai satu-satunya buku sumber pengajaran, pengamatan pada madrasah di Tanggamus



Lokakarya pertama di Halmahera Utara,
3 Juni 2024



Lokakarya kedua di Halmahera Utara,
7 Juni 2024



Pembelajaran membaca dan menulis di RA,
observasi pada RA di Halmahera Utara



Perpustakaan di sebuah perpustakaan
umum di Halmahera Utara



Kegiatan lokakarya di Nias Selatan



Sesi diskusi dalam kegiatan lokakarya di
Nias Selatan